

Karl Polanyi Menanam Ekonomi

B. Herry-Priyono

ABSTRAKSI. Karl Polanyi dikenal sebagai teoritikus ekonomi sosial yang menggagas konsep ketertanaman ekonomi. Konsep tersebut dipaparkan dalam bukunya yang sangat termasyhur berjudul *The Great Transformation* (1944) sebagai titik sentral dalam bidang sosiologi ekonomi. Bernard Barber mengkritik konsep ketertanaman ekonomi Polanyi sebagai konsep yang ambigu dan karenanya tidak dapat menjadi subjek utama dalam pemikiran ekonomi. Namun demikian, ketika menulis karya *The Great Transformation*, Polanyi menjelaskan terjadinya proses komodifikasi atas uang, tenaga kerja, dan tanah. Gagasan ketertanaman ekonomi bersamaan dengan konsepnya mengenai gerakan-balik memiliki urgensi pada konteks ini, dan karena itu karyanya memiliki motif moral untuk menyelamatkan masyarakat.

KATA KUNCI: Ekonomi yang tertanam dalam relasi sosial, ekonomi yang tercerabut dari relasi sosial, pengembangan komunitas, moralitas.

ABSTRACT. *Karl Polanyi has been recognized as a social-economic theorist for his concept of embedded economy. The concept was well-organized in his book The Great Transformation (1944) as the central point for the field of economic sociology. Bernard Barber criticized Polanyi's concept of embedded economy as something ambiguous and thus it cannot become the subject in the same theoretical scrutiny as other classic works in the field. For Barber, all economies are embedded and therefore there are central tensions and complexities concerning land, money, and labour in Polanyi's argument that must be clarified. However, as he was writing the book, he developed several new concepts, including fictitious commodities and embedded economy, that led in new directions to morality. The prospect is to create the conditions of the possibility to balance economic interests in financial sector with social interests in the real sectors. This is the meaning of double movement, that is, to deliberate the market in order to save society.*

KEY WORDS: *Embedded economy, disembedded economy, community development, morality.*

1. PENDAHULUAN

Di bulan Juni 2009, ketika krisis finansial yang berawal dari dampak kredit beracun perumahan di Amerika Serikat masih kencang bergulung, seorang wartawan duduk mewawancarai Paul Samuelson pada usianya ke-94 tahun. Ia nama legendaris dalam teks ekonomi, penata mazhab ekonomi neoklasik dengan kodifikasi model matematis sebagai modus penjelasan. Dengan matematisasi itu terbentuk kesan bahwa kausalitas berbagai gejala ekonomi dapat dijelaskan seperti hukum universal, tanpa terikat waktu dan ruang.

Kepada Samuelson salah satunya diajukan pertanyaan begini: "Apa yang akan Anda nasihatkan kepada seorang yang baru mulai belajar ekonomi pada tingkat pascasarjana?" Jawabannya menyimpang dari apa yang khas Samuelson: "Ya, saya akan bilang, dan ini mungkin jauh dari apa yang akan saya katakan ketika dahulu saya masih muda: berilah penghormatan yang pantas kepada studi sejarah ekonomi, karena dari situlah berasal bahan mentah bagi pembuktian atau terkaanmu. Dan saya pikir krisis ekonomi yang baru saja terjadi menunjukkan hal itu".¹

Tetapi, memasuki sejarah persis berisi sesuatu yang menakutkan. Dalam ungkapan sejarawan ekonomi Paul Bairoch, itu karena masuk sejarah akan membongkar "mitos dan paradoks" dalam banyak dalil ekonomi yang selama ini dianggap kekal.² Atau, dalam bahasa ekonom Joan Robinson, kodifikasi matematis itu membuat ilmu ekonomi lalu bisa mencurahkan perhatian utamanya pada "harmoni melenakan model ekuilibrium di balik ideologi *laissez-faire*, lalu fokus pada elaborasi argumen ekuilibrium itu membuat kita terlalu sibuk untuk masih peduli pada pertanyaan dan pemikiran yang berbahaya".³

Lantaran sejarah adalah pencipta kontingensi, apa saja yang kelihatan kekal mudah menjadi batal. Apakah motif mencari laba adalah kodrat manusia? Apakah perdagangan bebas keniscayaan hukum alam? Apakah ekonomi pasar berkinerja secara swa-tata (*self-regulating*)? Apakah mungkin motif tindakan ekonomi otonom dari ranah lain seperti politik atau relasi sosial? Mengapa kalkulasi ekonomi menjadi cara berpikir yang begitu dominan? Meskipun persoalan lama, semua pertanyaan itu justru kian menggigit dalam kondisi ekonomi-politik zaman ini.

Deret pertanyaan di atas maha luas. Tulisan ini hanya upaya sederhana menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengiris satu persoalan kecil sebagai pintu masuk, yaitu problem "ketertanaman" (*embeddedness*) dan "ketercerabutan" (*disembeddedness*) ekonomi dari semesta yang membentuk "realitas masyarakat".⁴ Jika dirumuskan dalam bahasa hemat, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan berikut: mengapa problematik ketertanaman dan ketercerabutan ekonomi merupakan persoalan penting?

Jawaban atas pertanyaan ringkas itu mengandaikan banyak hal. Dan tulisan kecil ini akan coba menjawabnya dengan cara menimbang ulang problematik "ketertanaman" dan "ketercerabutan" yang pernah diajukan Karl Polanyi. Istilah *embedded* dan *disembedded* secara langsung dipinjam dari karya Polanyi. Setelah menyebut latar belakang Polanyi, tulisan ini akan membahas pemakaian istilah tersebut dalam pemikirannya. Kemudian akan dikaji beberapa persoalan dasar yang terlibat dalam problematik "ketertanaman" dan "ketercerabutan" ekonomi. Akhirnya akan diajukan beberapa evaluasi dan relevansi bagi agenda mendekati masalah "ketertanaman" dan "ketercerabutan" ekonomi.

2. KARL POLANYI DAN PANGGILAN KRITIK

Karl Polanyi lahir 25 Oktober 1886 di Vienna, Austria, dari keluarga yang punya tradisi panjang dalam dunia akademik, intelektual dan politik. Keluarga Polanyi berasal dari akar migrasi yang kini merupakan wilayah Polandia. Nama asli keluarga itu adalah Pollacsek, dan dokumen resmi dari tahun 1868 menunjukkan bahwa Pollacsek adalah keluarga "dengan status sosial borjuasi".⁵ Sebagai ahli dan kontraktor kereta api, Mihály Pollacsek (ayah Karl) lalu memindahkan seluruh keluarga dari Vienna ke Budapest, Hungaria. Di Budapest, Mihály mengubah nama keluarga ke dalam bahasa Magyar menjadi Polanyi, namun ia sendiri mempertahankan nama Pollacsek bagi dirinya.⁶

Masa kecil Karl Polanyi berisi tradisi pendidikan klasik di rumah.⁷ Setelah tamat sekolah Gymnasium yang memberi tekanan studi klasik dan ilmu-ilmu alam, tahun 1904 Karl mulai belajar di universitas dalam bidang hukum dan politik, dan kombinasi dengan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Ia meraih gelar doktor hukum di tahun 1909.⁸ Sejak kecil Karl hidup dalam lingkungan revolusioner. Kakak Karl, Adolf, adalah pemimpin gerakan sosialis. Vienna dan Budapest masa itu adalah titik-temu kelompok-kelompok progresif revolusioner. Ibu Karl, Cecile Wohl, berasal dari Russia dan menjadi salah satu titik penghubung para revolusioner Russia: "Rumah Polanyi serta pesona Cecile menjadi pusat pertemuan kelompok intelektual Hungaria", seperti Georg Lukács, Béla Balázs, Ervin Szabó, Oszkár Jászi, dan tokoh revolusioner Russia Samuel Klatschko.⁹

Dalam lingkungan itu, tahun 1908 Karl mendirikan organisasi mahasiswa progresif dengan nama 'Lingkaran Galilei' (*Galilei Kör*), yang bertujuan "mengangkat kesadaran sosial melalui belajar dan mengajar", sebuah "renaisans filosofis dan ilmiah" sebagai "kritik terhadap keterbelakangan dan ciri reaksio-

ner dunia universitas serta cuaca kultural pada umumnya”.¹⁰ Salah satu posisi intelektual Lingkaran Galilei adalah kritik terhadap doktrin Marxisme Ortodoks mengenai ”mekanisme impersonal yang akan membawa perubahan sosial”.¹¹ Tetapi, dalam ungkapan Zsigmond Kende yang ikut mendirikan Lingkaran Galilei, ”Kami adalah para sosialis..., tanpa perlu menjadi dogmatik”.¹² Posisi intelektual Polanyi sendiri ”dapat dikatakan idealis dan populis”,¹³ dan ia tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Tahun 1915 Polanyi dipanggil untuk tugas militer dalam Perang Dunia I, jatuh sakit, kemudian dirawat sejak tahun 1917. Pada periode dirawat inilah ia mengaku:

”Aku tidak mengerti apa yang sedang mencekik, seperti tali mencekik seorang yang akan digantung... Sesuatu yang lain telah terjadi, yaitu dunia etis, untuk hidup dan memahami realitas etis..., hanya sekarang aku matang menjadi manusia”¹⁴

Tahun 1919 Polanyi pindah ke Vienna, secara emosional dan intelektual guncang oleh kebrutalan perang, pembredelan rezim Komunis atas majalah *Szabadgondolat* (tempat Polanyi pernah menjadi editor), dan penyakit tuberkulosis. Di Vienna ia bertemu dan menikah dengan seorang revolusioner, Ilona Duczynska.¹⁵ Pada masa Vienna inilah Polanyi kembali mempelajari secara serius ekonomi dan sosiologi, dan ia bekerja sebagai editor senior *Österreichische Volkswirt*, mirip majalah *The Economist* versi Austria. Ia membaca ulang *Das Capital* karya Karl Marx dan karya-karya ekonom Austria seperti Menger, Wieser, Böhm-Bawerk, Schumpeter, para ekonom marginalis seperti Wicksteed dan JB. Clark.¹⁶ Dalam periode ini ia juga terlibat perdebatan akademik dengan Ludwig von Mises tentang ekonomi sosialis. Sementara menolak teori

nilai kerja' Marx, posisi Polanyi dapat dikatakan sebagai "agenda memberi isi sosialis pada metodologi para ekonom mazhab Austria".¹⁷

Tahun 1933 ia pindah ke Inggris, setelah Hitler tampil dan Fascisme Nazi mulai menunjukkan ambisi ekspansinya ke Austria. Sementara Fascisme di Jerman, Austria dan Eropa Tengah serta Timur selalu membayangi,¹⁸ ia kini berhadapan dengan kondisi baru ekonomi-politik industrialisme di Inggris yang tidak kalah mengejutkan, terutama tentang kelas sosial, kinerja sistem ekonomi pasar dan berbagai penderitaan yang menyertainya. Problematik fascisme dan pasar swatata (*self-regulating market*) inilah yang di kemudian hari tampil sebagai tema pokok dalam karyanya. Di Inggris, Polanyi bekerja sebagai guru pada program sekolah orang dewasa, sebuah sistem pendidikan yang berafiliasi dengan Universitas London dan Oxford. Ia tenggelam mempelajari secara serius sejarah ekonomi dan sosial Inggris. Pada periode ini terkumpul banyak catatan studi dan bahan mengajar, yang menjadi embrio bagi buku yang kini paling dikenal, *The Great Transformation*.¹⁹

Buku itu ditulis selama ia menjadi akademisi tamu di Bennington College, Vermont, Amerika Serikat, dari 1940 sampai 1943. Pertama kali diterbitkan di AS pada tahun 1944, setahun kemudian (1945) buku itu juga diterbitkan di Inggris.²⁰ Dari Inggris, Polanyi kemudian pindah ke AS pada tahun 1947 dan menjadi guru besar tamu di Columbia University.²¹ Pada periode inilah Polanyi dan murid-muridnya melakukan banyak riset mengenai tata-ekonomi berbagai masyarakat purba dan kuno, yang dalam banyak hal merupakan upaya membuktikan kontingensi dan ilusi gagasan pasar swatata.²² Polanyi meninggal 23 April 1964 di Pickering, Ontario, Kanada.²³

3. ISTILAH TERTANAM MENJADI SENTRAL

Ada kemiripan nasib antara istilah 'tertanam' (*embedded*) yang dipakai Polanyi dalam *The Great Transformation* dan istilah 'tangan gaib' (*invisible hand*) dalam karya klasik Adam Smith, *The Wealth of Nations* (1776). Sebagaimana Smith tidak pernah memakai istilah 'tangan gaib' sebagai konsep kunci (Smith memakai istilah itu hanya sekali dalam karya besarnya),²⁴ demikian pula Polanyi tidak menggunakan istilah 'tertanam' sebagai konsep kunci yang menyangga bangunan teorinya. Kata itu tidak tercantum dalam Indeks, dan secara verbatim Polanyi hanya memakainya lima kali dalam buku *The Great Transformation* (selanjutnya disingkat *GT*).²⁵ Yang paling dikenal adalah ketika Polanyi memakainya untuk melukiskan bagaimana ekonomi pasar swatata (*market economy*) akhirnya menciptakan organisasi masyarakat yang sepenuhnya didasarkan pada pasar (*market society*): "Ekonomi tidak lagi tertanam dalam relasi-relasi sosial, tetapi relasi-relasi sosial tertanam dalam sistem ekonomi".²⁶

Dari lima kali kesempatan memakai istilah 'tertanam', cukup pasti Polanyi tidak memaksudkannya sebagai konsep yang punya signifikansi teoretis maupun metodologis, melainkan hanya berfungsi secara performatif. Kurang lebih mirip dengan status kata 'bersama' dalam ujaran, misalnya, "Aku akan pergi bersama seorang kawan". Seperti diisyaratkan Mark Granovetter, paling jauh penggunaan kata *embedded* dalam *GT* hanya "berperan sebagai pengumuman (*announcement*)".²⁷ Dari mana Polanyi mengambil dan kemudian mendayagunakan kata *embedded*? Selain sejak kecil Polanyi menguasai bahasa Inggris dan dikenal menulis dengan gaya figuratif yang indah,²⁸ kata *to embed* juga kata bentukan biasa dalam bahasa Inggris, seperti halnya kata *to enforce*, *to enable* ataupun *to empower*. Dalam bahasa Indonesia, *to embed* sebagaimana dipakai Polanyi

mungkin cukup dekat dengan arti 'melekatkan'. Gambaran yang menjadi ilham Polanyi bagi pemakaian kata itu sangat mungkin berasal dari dunia pertambangan. Dalam studi serius mengenai sejarah ekonomi Inggris, Polanyi banyak membaca cara kerja aneka teknologi yang dipakai untuk menambang batu bara yang melekat (*embedded*) pada dinding-dinding batu kawasan tambang.²⁹

Namun kata 'melekatkan' barangkali terlalu datar dan netral. Dengan figurasi dari dunia agraris, kata 'menanam' mungkin lebih kuat mengungkapkan maksudnya. Dengan demikian kata *to embed*: menanam; *embedded*: tertanam; *embeddedness*: ketertanaman; *disembedded*: tercerabut; *disembeddedness*: ketercerabutan. Bagaimana suatu istilah yang pada awalnya tak punya signifikansi teoretis dan metodologis kemudian dianggap sentral dalam bangunan pemikiran Polanyi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat sejenak posisi istilah 'ketertanaman' (*embeddedness*) dalam arus argumen *GT*.

Dalam surat pribadi kepada John Kouwenhoven, seorang akademisi yang membantu penerbitan *GT*, Polanyi menuliskan demikian: "Sebenarnya buku itu berkisah tentang muncul dan runtuhnya ekonomi pasar, yaitu sejarah sosial 150 tahun terakhir".³⁰ Dalam bahasa formal, Polanyi merumuskan inti argumen buku *GT* sebagai berikut:

"Tesis buku ini adalah bahwa gagasan pasar swatata mengisyaratkan utopia ekstrem. Pasar swatata tak mungkin bertahan untuk waktu lama tanpa meluluh-lantakkan hakikat manusiawi dan alami masyarakat; secara fisik menghancurkan manusia dan mengubah lingkungannya menjadi padang gurun. Itulah mengapa masyarakat niscaya menempuh berbagai langkah untuk melindungi diri, namun langkah perlindungan diri apa pun yang diambil akan merusak kinerja swatata pasar sendiri, mengganggu kehidupan industri, dan karena itu dalam arti lain juga

membahayakan masyarakat. Dilema inilah yang memaksa perkembangan sistem pasar masuk ke dalam alur tertentu, dan pada akhirnya mengacaukan organisasi sosial yang berdiri di atasnya”.³¹

Bagaimana argumen yang padat itu direntang di dalam *GT*? Seperti telah disebut, Polanyi merajut dua problematik sekaligus dalam satu arus analisis, yaitu pasar swatata dan fascisme. Pertama, masa 100 tahun dari 1815 sampai 1914 adalah kurun sejarah yang damai dan makmur, setidaknya bagi negara-negara besar Eropa. Kondisi itu berdiri di atas empat lembaga penyangga, yaitu sistem pasar swatata (*self-regulating market*), tata keuangan berdasar standar emas (*gold standard*), tata negara liberal (*the liberal state*), dan perimbangan kekuatan (*balance of power*).³²

Kedua, meskipun pecahnya Perang Dunia I punya dadakan yang khusus, penyebab lebih mendasar terletak dalam ”runtuhnya standar emas internasional yang merupakan rantai pengait antara disintegrasi ekonomi dunia pada peralihan abad dan transformasi peradaban [abad ke-19] yang berlangsung pada dasawarsa 1930-an”.³³ Di balik semua itu adalah ciri utopis gagasan sistem ekonomi pasar swatata. Meminjam prinsip Aristotelian, Polanyi berpandangan bahwa masyarakat (*society*) adalah organisme sosial alamiah, termasuk di dalamnya dinamika organik pemenuhan kebutuhan material warganya. Di sini terletak pentingnya tiga modus koordinasi sosial, termasuk bagaimana produksi dan distribusi dilakukan. Tiga modus itu adalah prinsip resiprositas (*reciprocity*), redistribusi (*redistribution*), dan tata-rumahtangga (*householding*).³⁴ Pengadaan produksi/distribusi melalui ’pasar’ (*market*) berperan penting sebagai salah satu instrumen dalam tiga modus koordinasi itu, tetapi tidak pernah menjadi penentu atau bahkan mencaplok tiga prinsip koordinasi tersebut.

Ketiga, "transformasi besar" pertama terjadi dengan munculnya perubahan konsep 'pasar', dari statusnya sebagai pembantu bagi koordinasi sosial (dengan tiga prinsip di atas) menjadi prinsip utama koordinasi itu sendiri. Pasar (*market*) sebagai alat pertukaran diubah menjadi sistem organisasi seluruh masyarakat (*market system*).³⁵ Secara historis, momentum itu terjadi pada masa di sekitar penghapusan 'Undang-Undang Perlindungan Orang Miskin' (*Poor Law Reform*) 1834 di Inggris. Dalam bahasa Polanyi, "berdirinya ekonomi pasar" itu melibatkan:

"Transformasi motif tindakan pada seluruh warga masyarakat; motif subsistensi diganti dengan motif laba. Semua pertukaran diubah menjadi transaksi yang didasarkan pada nilai uang, dan proses ini pada gilirannya menuntut aplikasi sarana transaksi pada setiap pori-pori kehidupan industri. Semua pendapatan harus berasal dari penjualan atas sesuatu, dan sumber penghasilan apa pun harus dipandang berasal dari penjualan. Dengan itu diisyaratkan istilah 'sistem pasar' (*market system*) sebagai mekanisme kerja institusional. Kekhasan paling mengejutkan dari sistem ini adalah, setelah terbentuk, semuanya diharuskan berfungsi tanpa campur tangan luar... Harga diharuskan mengatur dirinya sendiri".³⁶

Dengan kata lain, transformasi itu melibatkan kemunculan sistem ekonomi pasar sebagai prinsip koordinasi seluruh masyarakat, yang kemudian menciptakan masyarakat pasar. 'Pasar' bahkan bukan lagi hanya salah satu mekanisme pembantu kehidupan ekonomi, tetapi 'pasar' dan 'ekonomi' menjadi sama-dan-sebangun. Karena secara substantif tidak pernah ada tindakan yang semata 'ekonomi' (atau, tak pernah ada tindakan 'ekonomi' terpisah dari arus tindakan non-ekonomi),³⁷ kemunculan sistem ekonomi pasar (*market economy*) dengan cepat bermuara pada kemunculan masyarakat pasar (*market society*).

Keempat, lebih spesifik lagi, pemicu proses itu adalah terjadinya apa yang Polanyi sebut "komoditas semu" (*fictitious commodities*). Sistem ekonomi pasar mengubah alam (*nature*), masyarakat (*society*) dan manusia (*humanity*) menjadi komoditas tanah (*land*), uang (*money*) dan tenaga kerja (*labour*).³⁸ Penghapusan Undang-Undang Perlindungan Orang Miskin (1834) adalah akhir nilai keramat tenaga kerja, runtuhnya benteng terakhir dari serbuan komodifikasi. Sejak itu, istilah 'pasar tenaga kerja' (*labour market*) menjadi idiom ekonomi. Dengan prinsip Aristotelian, Polanyi melihat bahwa "tenaga kerja, tanah, dan uang jelas-jelas *bukan* komoditas".³⁹

"'Tenaga kerja' (*labour*) hanya nama lain bagi daya gerak yang terlibat dalam hidup itu sendiri, yang tentu saja tidak diproduksi untuk dijual tetapi untuk tujuan lain, dan tidak juga daya gerak manusia dapat dipisahkan dari apa yang membentuk kehidupan, disimpan dalam lumbung atau dipindahkan ke sana ke mari. 'Tanah' (*land*) hanya nama lain bagi alam, yang tidak dibuat oleh manusia; 'uang yang riil' (*actual money*) hanyalah bukti daya-beli yang juga samasekali tidak diproduksi, tetapi menjadi ada melalui mekanisme perbankan dan keuangan negara. Tak satupun dari ketiganya diproduksi untuk jual-beli. Pengenaan ciri komoditas pada tenaga kerja, tanah dan uang itu sepenuhnya fiktif".⁴⁰

Justru karena komodifikasi daya kerja, tanah dan uang merupakan realitas fiktif, ia "akan membawa penghancuran masyarakat..., tidak satu pun masyarakat dapat bertahan dari dampak sistem fiksi yang ganas itu bahkan untuk waktu yang singkat, kecuali hakikat manusia dan alam serta organisasi usahanya dilindungi dari keganasan gilingan setan ini (*satanic mill*)".⁴¹

Kelima, di titik inilah terletak sentralitas konsep 'gerakan balik' (*double movement*) dalam keseluruhan argumen Polanyi: "Sementara, di satu pihak,

sistem pasar meluas ke seluruh muka bumi..., di lain pihak terciptalah jaringan tindakan dan kebijakan yang diintegrasikan dalam berbagai lembaga penting untuk mengurangi komodifikasi tenaga kerja, tanah dan uang".⁴² Gerakan balik ini bukanlah langkah-langkah voluntaris yang sengaja dirancang kelompok-kelompok ideologi kiri, kaum kolektivis, kelas sosial atau kelompok lain yang menolak komodifikasi tenaga kerja, tanah dan uang, tapi merupakan denyut alamiah dari dinamika pertahanan-diri masyarakat (*self-protection*).⁴³ Berbagai kebijakan, dari undang-undang upah minimum, aturan keselamatan kerja, sampai adanya Bank Sentral sebagai regulator keuangan suatu negara menunjuk perlindungan-diri itu.

Keenam, namun demikian, "se-vital apa pun gerakan balik itu bagi perlindungan-diri masyarakat, pada akhirnya ia tidak sesuai dengan ciri swatata pasar, dan karena itu juga tak sejalan dengan sistem pasar itu sendiri".⁴⁴ Di sinilah terletak kaitan erat antara kinerja sistem pasar swatata dan gejala fasisme. Ciri utopis pasar swatata dapat tetap berdiri hanya dengan tangan-besi, tapi tangan-besi itu sendiri mengandaikan peniadaan berbagai kebebasan yang menjadi prasyarat kehidupan masyarakat. Runtuhnya keuangan standar emas dan munculnya berbagai rezim fasis sekitar tahun 1931 adalah simptomnya. Fiksi pasar swatata "akan membawa penghancuran masyarakat", karena melalui komodifikasi tanah, uang dan tenaga kerja, fiksi itu menghapus ciri alami masyarakat.

Di mana letak masalah 'ketertanaman' (*embeddedness*) dalam arus argumen Polanyi itu? Seperti telah disinggung sejenak di atas, cukup pasti dalam *GT* istilah 'tertanam' (*embedded*) tidak mempunyai status sentral seperti misalnya konsep 'pasar swatata' (*self-regulating market*), 'komoditas semu' (*fictitious*

commodity), dan 'gerakan balik' (*double movement*).⁴⁵ Paling jauh hanya bisa dikatakan bahwa istilah itu dipakai sebagai penanda performatif bagi lekatnya kegiatan yang disebut 'ekonomi' pada modus-modus koordinasi masyarakat dalam prinsip resiprositas, redistribusi, dan tata-rumahtangga. Dalam ungkapan Polanyi, "motif dan prasyarat aktivitas produktif [ekonomi] tertanam dalam organisasi masyarakat pada umumnya".⁴⁶

Namun dengan munculnya komodifikasi fiktif dalam sistem pasar swatata yang dimulai abad ke-19, "ketertanaman" itu lenyap dan berganti menjadi "ketercerabutan". Artinya, dalam kinerja pasar swatata kegiatan yang disebut ekonomi terlepas dari modus-modus koordinasi sosial apa pun. Dan karena kinerja pasar swatata kini menjadi sama-sebangun dengan apa yang disebut ekonomi itu sendiri, sistem pasar swatata bisa disebut sebagai ekonomi yang "tercerabut" (*disembedded*). Itulah mengapa Polanyi menulis bahwa pasar swatata adalah:

"Prinsip yang berseberangan dengan kebahagiaan individual dan umum, yang meluluh-lantakkan lingkungan sosialnya, lingkungan sesamanya, nilai dirinya dalam komunitas, keahliannya; singkat kata, meluluh-lantakkan hubungannya dengan alam dan sesama, dalam mana eksistensi ekonominya dahulu tertanam".⁴⁷

Dengan demikian, rupanya dalam *GT* Polanyi memakai 'tertanam' sebagai istilah performatif untuk menunjuk kadar/gradasi keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Istilah 'tertanam' dipakai untuk menunjuk kaitan erat antara keduanya, atau bahkan ekonomi sekadar bagian dari apa yang non-ekonomi. Sedangkan 'tercerabut' menunjuk pada kaitan tipis/tiadanya kaitan antara keduanya, atau bahkan apa yang non-ekonomi dihisap oleh yang

ekonomi. Rupanya itulah maksudnya ketika Polanyi menulis: "Ekonomi tidak lagi tertanam dalam relasi-relasi sosial, tetapi relasi-relasi sosial tertanam dalam sistem ekonomi".⁴⁸

Namun Polanyi tidak berhenti dengan *GT*. Untuk membuktikan bahwa ke-sama-sebangun-an antara 'ekonomi' dan 'pasar swatata' adalah kesesatan besar, Polanyi dan para muridnya masuk jauh ke dalam sejarah. Mereka secara serius meneliti modus-modus ekonomi dalam berbagai masyarakat purba dan kuno, dari masyarakat pemburu, petani, sampai pedagang; dari masyarakat Babilonia, Mesir dan Mesopotamia, Aztec dan Maya, India, Dahomey, Ashanti dan Whydah di Afrika, sampai Berber di dataran tinggi Afrika Utara.⁴⁹ Apa yang ditemukan dalam berbagai penelitian tersebut adalah variasi modus ke-tertanaman ekonomi dalam koordinasi keberlangsungan seluruh masyarakat. Teknik berdagang, berburu, alat pertukaran, proses produksi, alokasi, distribusi dan sebagainya dilakukan sebagai bagian dari koordinasi kelangsungan seluruh masyarakat, dan bukan keberlangsungan seluruh masyarakat dikebawahkan pada teknik-teknik itu.

Dari penelitian-penelitian itulah rupanya kemudian muncul arti alternatif bagi istilah 'ketertanaman' (*embeddedness*). Karena tak pernah dan tak mungkin pernah ada tindakan ekonomi yang samasekali terlepas dari kinerja gugus institusional lain (seperti politik, budaya, agama, hukum, adat, dsb), Polanyi kemudian menulis demikian:

"Semua ekonomi tertanam (*embedded*) dan terjaring (*enmeshed*) dalam institusi-institusi, ekonomi dan non-ekonomi. Studi pergeseran tempat ekonomi dalam masyarakat tidak lain kecuali studi tentang cara-cara bagaimana proses ekonomi dilembagakan pada waktu dan ruang yang berbeda-beda".⁵⁰

Pada hemat saya, kutipan di atas punya dua unsur sentral dengan dua implikasi besar. *Pertama*, jika ”semua ekonomi tertanam dan terjaring dalam institusi, ekonomi maupun non-ekonomi”, maka baik secara teoretik maupun empirik tidak mungkin ada modus ekonomi yang tidak tertanam atau juga tercerabut. Itu berlaku bukan hanya bagi modus ekonomi masyarakat purba, tetapi juga bagi modus ekonomi modern yang sering disebut pasar swatata. *Kedua*, jika ”studi tentang pergeseran tempat ekonomi dalam masyarakat menyangkut bagaimana proses ekonomi dilembagakan”, dan jika tidak ada ekonomi yang tidak tertanam dalam tatanan kelembagaan, maka perbedaan antara ekonomi purba dan ekonomi modern bukan terletak dalam ciri ’tertanam’ ekonomi purba dan ciri ’tercerabut’ ekonomi modern, tetapi pada modus ’ketertanamannya’ (*mode of embeddedness*).

Dua pokok sentral itu pada gilirannya menyingkapkan ambiguitas pemakaian istilah ’tertanam’ dalam arus pemikiran Polanyi. Dalam *GT*, istilah ’tertanam’ sekadar berciri performatif dan tidak punya status konseptual yang penting. Tetapi dalam karya-karya selanjutnya, rupanya istilah ’tertanam’ mempunyai arti sentral.⁵¹ Dan sentralitas itu juga dinyatakan dalam pemakaian secara lebih sering.⁵² Namun pemakaian yang lebih sering itu juga tidak memecahkan ambiguitas antara ”ekonomi pasar swatata sebagai tercerabut” dan ”semua ekonomi senantiasa tertanam dalam tata sosial”. Bahkan dalam buku di mana tertulis ”semua ekonomi selalu tertanam dalam tata kelembagaan”, Polanyi menulis ini:

”Perangkat konseptual untuk memahami transisi dari kondisi tanpa nama ke keberadaan yang terpisah... adalah *pembedaan antara ekonomi yang ’tertanam’ dan ’tercerabut’ dalam kaitannya dengan masyarakat*. Ekono-

mi tercerabut abad ke-19 berdiri terpisah dari masyarakat, secara lebih khusus terpisah dari sistem politik dan pemerintahan... Produksi dan distribusi barang ditempuh melalui sistem swatata pasar harga. Sistem swatata digerakkan oleh logikanya sendiri yang disebut dalil pasokan dan permintaan, dipicu oleh rasa takut akan kelaparan dan hasrat akan laba. Hubungan darah, paksaan hukum, kewajiban agama, kesetiaan, bahkan sihir tak sanggup menjadi latar sosiologis yang mendorong orang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi; hanya urusan yang khas ekonomi seperti bisnis pribadi dan sistem upah dapat menggerakkan... Dalam realitas, *rentang antara ekonomi 'tertanam' dan 'tercerabut' adalah soal kadar/gradasi. Namun pembedaan itu mendasar untuk memahami masyarakat modern*⁵³.

Ringkasnya, di satu pihak Polanyi mengajukan argumen bahwa semua ekonomi pasti tertanam dalam tata kelembagaan sosial, tetapi di lain pihak ia berargumen bahwa ekonomi pasar swatata merupakan ekonomi yang tidak tertanam/tercerabut. Untuk lebih memperjelas, tabel di bawah ini menyajikan ambiguitas itu.

Dua Pengertian 'Ketertanaman' dalam Pemikiran Polanyi

<i>Semua ekonomi selalu tertanam</i>	<i>Ekonomi pasar swatata adalah ekonomi tercerabut</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Semua bentuk ekonomi selalu tertanam, karena kehidupan ekonomi adalah proses yang secara sosial terlembagakan dan diorganisasikan. • Jika semua bentuk ekonomi selalu tertanam, itu juga berlaku bagi ekonomi pasar swatata. 	<p>Derajat ketertanaman berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung bagaimana ekonominya diintegrasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jika terintegrasikan sebagai bagian tujuan 'non-pasar', ia disebut tertanam. • jika terintegrasikan sebagai bagian tujuan yang secara ketat bersifat 'pasar', ia beralih ke arah tercerabut melalui komodifikasi tanah, tenaga kerja, dan uang.

Sumber: Gemici, 'Karl Polanyi and the...', 2008, hal. 9 (dengan modifikasi dan tambahan perumusan).

4. AMBIGUITAS ARTI KETERTANAMAN EKONOMI

Ambiguitas di atas telah menuai kajian lanjut atas pemikiran Polanyi. Dari logika internal bangunan pemikiran Polanyi, Bernard Barber misalnya melihat kemustahilan argumen bahwa ekonomi pasar swatata merupakan modus ekonomi yang tercerabut: "Semua jenis ekonomi selalu tertanam dalam semesta sistem sosial yang kompleks".⁵⁴ Itulah mengapa bahkan sistem ekonomi pasar swatata yang biasanya disebut kapitalisme tidaklah monolit, tetapi berisi banyak variasi. Dan variasi itu menyangkut bukan hanya ciri-ciri luarnya tetapi bahkan unsur-unsur inti kinerjanya, seperti alasan barang/jasa diproduksi, corak akuntansi, perbedaan peran bank dan pasar modal, hubungan kerja, sistem kontrak kerja, sampai corak relasi antara sektor swasta dan pemerintah.⁵⁵ Peran kunci perbankan dalam ekonomi pasar model Jerman sangat berbeda dengan model Anglo-Saxon, dan keduanya berbeda lagi dengan model Latin maupun Asia Timur.⁵⁶

John Lie juga melihat ciri tercerabut sistem ekonomi swatata itu sebagai mustahil. Dengan masuk ke dalam sejarah munculnya sistem pasar di Inggris sebelum abad ke-19, Lie menemukan bagaimana dalam kemunculan sistem pasar, peran pedagang perantara (*middlemen merchants*) yang berbasis di London samasekali 'tertanam' dalam jaringan aparatus negara.⁵⁷ Itulah mengapa Polanyi "gagal menanam konsep 'pasar'.., argumennya mesti didorong menuju konsekuensi logisnya – bahwa semua aktivitas ekonomi dan institusi selalu tertanam dalam relasi-relasi sosial".⁵⁸

Bagi Gemici, ambiguitas itu nyata dalam pemikiran Polanyi, tetapi bukannya tanpa solusi. Terutama jika *GT* ditempatkan dalam seluruh arus pemikiran Polanyi sesudahnya, cukup jelas bahwa "ekonomi yang tercerabut

tidaklah mungkin, namun beberapa tata ekonomi lebih terserap (*absorbed*) dalam institusi dan relasi-relasi sosial dibanding tata ekonomi lain”.⁵⁹ Meskipun istilah ‘tertanam’ tidak mempunyai tempat penting dalam *GT*, karya-karya sesudahnya rupanya mengisyaratkan bahwa ”Polanyi mengajukan suatu metode untuk mengkaji kehidupan ekonomi yang berseberangan dengan individualisme metodologis... Karena itu, istilah ‘ketertanaman’ (*embeddedness*) muncul sebagai prinsip metodologis, dan bukan sebagai proposisi analitik”.⁶⁰ Sebagai prinsip metodologis, dalam arti bahwa Polanyi mengajukan ”pendekatan yang menunjukkan apa yang menjadi unit dan objek analisis dalam mengkaji kehidupan ekonomi; bahwa berfokus pada perilaku atomistik seraya mengabaikan pengaruh institusi dan relasi sosial adalah menyesatkan”.⁶¹ Itulah mengapa, bagi Polanyi, apa yang dituntut dalam kajian ekonomi bukan konsep rasionalitas pilihan individual (*rationality of choice*), tetapi konsep substantif tentang ekonomi sebagai ”mata pencaharian manusia”.⁶²

Namun, bila sejak awal Polanyi juga melihat bahwa tidak mungkin ada tata ekonomi yang tidak tertanam dalam jaringan hukum, politik dan moralitas, mengapa ambiguitas itu menganga sampai akhir? Dalam kajian atas masalah ini, Fred Block menulis:

”Polanyi menemukan gagasan tentang ekonomi pasar yang selalu tertanam, tetapi tidak dapat memberi nama pada temuannya itu. Ia menyediakan bagi kita beberapa usul yang sangat penting tentang bagaimana melakukan analisis atas ekonomi pasar yang selalu tertanam. Namun ia belum berhasil memberi kita pembahasan yang sistematis”.⁶³

Segera setelah Perang Dunia II berakhir, tata dunia terbelah dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Intensifikasi Perang Dingin sa-

ngat berpengaruh pada cuaca intelektual, sampai pada kondisi di mana pilihan posisi hanya berkisar pada alternatif kapitalisme atau sosialisme. Dalam cuaca politik dan intelektual seperti inilah pencarian gagasan alternatif seperti yang dilakukan Polanyi lewat konsep 'ketertanaman' (*embeddedness*) juga kemudian terpinggirkan. Inilah periode ketika Polanyi menghadapi "suasana intoleran dalam kehidupan politik dan akademik Amerika" yang membuatnya lalu "mengalihkan energi intelektual pada analisis tentang modus-modus ekonomi purba dan kuno, daripada mengembangkan kritik atas ekonomi pasar".⁶⁴ Itulah mengapa yang kini kita warisi adalah "visi yang secara teoretik kurus tentang ekonomi pasar yang selalu tertanam".⁶⁵ Polanyi tidak samasekali menghindar dari persoalan itu, dan dengan meneliti bentuk-bentuk ekonomi purba serta kuno ia menempuh jalan historis untuk membuktikan kesesatan klaim bahwa sistem pasar swatata adalah universal, mengatasi waktu dan ruang, serta klaim bahwa pasar swatata identik dengan definisi ekonomi.

Juga dengan kelemahan teoretik yang besar itu, rupanya makin jelas bahwa konsep 'ketertanaman' (*embeddedness*) yang diwariskan Polanyi punya daya programatik yang mencengangkan. Sejak artikel berpengaruh Mark Granovetter di tahun 1985 yang secara programatik membangkitkan kembali konsep 'ketertanaman', istilah itu menyebar luas dan menjadi agenda teoretik dalam berbagai studi mengenai tempat ekonomi dalam tata masyarakat.⁶⁶ Misalnya, studi yang dewasa ini berkembang pesat tentang variasi jenis kapitalisme secara eksplisit merujuk konsep 'ketertanaman' warisan Polanyi.⁶⁷ Berbagai studi itu kurang-lebih mengajukan argumen yang jelas-jelas Polanyian: jika semua bentuk ekonomi selalu tertanam dalam gugus institusional di mana ekonomi itu beroperasi, tentulah ekonomi kapitalis juga tertanam; dan dengan demikian

pastilah tidak hanya ada satu jenis kapitalisme, melainkan ada beraneka ragam kapitalisme yang ditandai oleh konfigurasi institusional yang berbeda-beda pula.⁶⁸

Setelah beberapa klarifikasi di atas, pertanyaan sentral berikut perlu diajukan: apa pokok masalah 'ketertanaman' dalam pemikiran ekonomi? Pokok ini membawa kita pada kajian Polanyi mengenai tempat 'ekonomi' dalam keseluruhan gugus institusional yang membentuk masyarakat.

Pertama-tama perlu dipahami bahwa bagi Polanyi arti 'ekonomi' yang dikenal luas dewasa ini menyesatkan. Itu berlaku baik untuk arti 'ekonomi' sebagai kegiatan/bidang (*oikonomia, economy*) maupun 'ekonomi' sebagai suatu pendekatan/ilmu (*oikonomike, economics*). Pada keduanya telah terjadi apa yang ia namakan "kesesatan ekonomistik" (*economistic fallacy*).⁶⁹ Mengartikan 'ekonomi' sebagai aktivitas transaksi pasar swasta dan kegiatan akumulasi laba (*economy*), ataupun juga sebagai pendekatan/ilmu pemilihan atas penggunaan sarana-sarana yang langka (*economics*) bukan hanya ahistoris, tetapi juga kosong dari substansi. Seandainya itu yang dimaksudkan dengan arti ekonomi, "kita dapat segera menyimpulkan bahwa semua masyarakat purba dan kuno secara hakiki tidak alami" dan tidak punya kehidupan ekonomi.⁷⁰ Dengan rumusan lain, hanya masyarakat modern atau pascamodern yang punya ekonomi.

Bahkan tanpa perlu penelitian sejarah, pengertian itu pastilah kesesatan besar, sebab dengan itu berarti seluruh sejarah manusia sebelum munculnya sistem pasar dan keluasan motif laba akan dianggap tidak relevan. Di tempat lain Polanyi menulis: "Menciutkan bidang genus *ekonomi* secara khusus pada sistem pasar sama dengan membuang bagian terbesar sejarah manusia dari arus peristiwa".⁷¹ Justru agar kesesatan tersebut tidak terus terjadi, perlulah dibang-

kitkan kembali arti substantif 'ekonomi'. Dengan ringkas Polanyi mendefinisikan ekonomi sebagai "organisasi mata-pencapaian manusia" (*livelihood of man*).⁷² Definisi substantif ini jauh lebih "sanggup menyediakan konsep yang dibutuhkan ilmu-ilmu sosial bagi tujuan penyelidikan semua corak empirik ekonomi di masa lalu maupun sekarang".⁷³ Dengan begitu, baik ekonomi masyarakat pemburu, petani, maupun ekonomi masyarakat kapitalis ultra-modern dapat diterangi oleh konsep yang lebih punya kekuatan teoretik.

Namun, dengan itu juga menjadi jelas bahwa pokok soalnya bukan pertama-tama terletak dalam perubahan arti 'ekonomi' – dari "organisasi mata-pencapaian" (dahulu) menjadi "aktivitas sistem pasar" (sekarang). Seperti telah disebut, cara berpikir itu akan menganggap seluruh modus ekonomi sebelum kapitalisme sebagai tak pernah terjadi atau bukan ekonomi. Pokok soalnya terletak dalam "cara melalui mana proses ekonomi [sebagai organisasi mata-pencapaian] terjahit dalam gugus kelembagaan pada waktu dan tempat berbeda".⁷⁴ Dengan demikian, secara teoretis tak ada perbedaan substantif antara ekonomi kuno dan modern; yang membedakan keduanya adalah corak keterjahitannya dalam gugus institusi yang secara keseluruhan membentuk realitas masyarakat.⁷⁵ Pada pokok inilah terletak pentingnya corak koordinasi masyarakat yang ditemukan Polanyi dalam penelitiannya tentang bentuk-bentuk ekonomi purba dan kuno. Sudah dalam *GT* Polanyi mengajukan tipologi itu, yang kemudian ia kembangkan lebih jauh berdasarkan penelitian historis dan antropologis yang lebih lengkap.

Pertama, modus koordinasi yang didasarkan pada prinsip resiprositas (*reciprocity*). Resiprositas "menunjuk pada gerakan antara titik-titik yang saling terkait dalam jaringan kelompok-kelompok yang simetris".⁷⁶ Dalam modus ini,

dinamika ekonomi berlangsung intra dan antar kelompok secara sejajar, dengan prinsip memberi-dan-menerima, ”bukan terutama dalam rangka mengamankan kepentingan diri atas pemilikan barang-barang, tetapi mengamankan status sosial, klaim sosial dan aset sosial”.⁷⁷ Dinamika pengadaan mata-pencaharian berlangsung atas dasar motif yang dalam alam pikir dewasa ini dapat disebut ”non-ekonomi”. Ini dimungkinkan karena komunitas menjaga semua anggotanya dari bahaya kelaparan. Tentu itu bukan berarti tidak ada nafsu dan kepentingan diri, tetapi kepentingan diri itu tidak akan terpenuhi kecuali seorang mengarahkan diri pada tujuan-tujuan ”non-ekonomi”. Pelanggaran kode etik itu ”akan dianggap sebagai ketidakpatutan dan pengkhianatan”.⁷⁸ Itulah juga yang dimaksud Aristoteles ketika ia menyatakan bahwa kehendak baik (*philia*) yang mendasari resiprositas (*antipeponthos*) merupakan dasar kehidupan setiap komunitas (*koinōnia*).⁷⁹

Kedua, modus koordinasi yang didasarkan pada prinsip redistribusi (*redistribution*). Redistribusi ”menunjuk pada gerak apropriasi menuju pusat dan mengalir dari pusat”.⁸⁰ Apabila resiprositas mengandaikan kerangka tatanan kesejajaran (*symmetry*), redistribusi mengandaikan bingkai tatanan masyarakat yang ditandai adanya titik pusat (*centricity*). Kode etik dalam prinsip resiprositas juga berlaku dalam prinsip redistribusi ini, yaitu apa yang saya berikan hari ini kepada komunitas akan dikembalikan lewat apa yang saya ambil besok. Namun kinerjanya berjalan ”melalui perantara dalam pribadi seorang kepala atau anggota yang dianggap bijak”.⁸¹ Dasar pelaksanaannya bisa bermacam-macam, dari adat-istiadat, hukum, sampai penetapan *ad hoc*.⁸² Perlu ditegaskan bahwa transaksi ala jual-beli pasar juga dipakai dalam pelaksanaan resiprositas maupun redistribusi, tetapi penetapan harga (*price*) tidak dilakukan secara terpisah dari tujuan spesi-

fik transaksi itu sendiri, baik yang menyangkut objek barang/jasa tertentu maupun untuk kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang saling terlibat dalam transaksi.⁸³ Selain itu, modus resiprositas dan redistribusi biasanya juga dipakai secara bersama-sama.

Ketiga, modus mata-pencarian yang disebut tata-rumahtangga (*householding*). Modus ini tak lain berarti proses pemenuhan kebutuhan melalui produksi bagi pemakaian sendiri.⁸⁴ Sulit untuk mengatakan apakah modus ini dapat disejajarkan dengan modus resiprositas dan redistribusi, terutama karena autarki total satu rumah-tangga dari jaringan rumah-tangga lain dapat dianggap mustahil. Akan tetapi, Polanyi melihat modus ini perlu diajukan terutama karena Aristoteles memakainya untuk memberi peringatan tentang kontras antara "produksi untuk digunakan" (*oikonomia*) dan "produksi untuk pengejaran laba" (*chrematistike*).⁸⁵ Agar punya dampak integratif pada lingkup masyarakat, pada akhirnya prinsip ini mensyaratkan kinerja prinsip resiprositas dan redistribusi.

Cukup jelas bahwa bagi Polanyi kedua prinsip koordinasi kehidupan ekonomi di atas (dengan mengecualikan prinsip tata-rumahtangga) tidak mungkin berjalan tanpa apa yang disebut "tata kelembagaan spesifik, seperti tatanan sosial simetris [untuk resiprositas] dan tatanan dengan titik sentrisitas [untuk redistribusi]".⁸⁶ Dalam arti itulah Polanyi melihat tidak mungkin ada ekonomi yang tidak tertanam dalam gugus institusional yang menjadi prasyaratnya. Dengan demikian, apabila istilah 'ketertanaman' (*embeddedness*) terdengar kabur, rupanya pokok persoalannya terletak dalam proses 'pelembagaan' (*institutedness*) aktivitas ekonomi dalam jaringan pranata yang menyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat.⁸⁷ Polanyi sendiri menulis: "...untuk menerobos kabut

kaitan-kaitan sosial di mana ekonomi tertanam, itulah tugas yang disebut analisis institusional” ekonomi.⁸⁸ Lalu, prinsip apa yang ada di belakang ekonomi pasar swatata? Dan tata kelembagaan apa yang menyangga? Inilah pokok yang menjadi fokus pemikiran Polanyi.

Keempat, prinsip itu disebut ’transaksi’ (*exchange*). Dalam rumusan Polanyi, istilah ”transaksi menunjuk pada perpindahan timbal balik yang terjadi antar ”tangan-tangan” dalam bingkai sistem pasar”.⁸⁹ Bila prinsip resiprositas mengandaikan tata institusional simetri, sedangkan redistribusi mensyaratkan kelembagaan sentrisitas, prinsip transaksi (*exchange*) punya daya integratif hanya jika disangga oleh tata kelembagaan sistem pasar yang didasarkan pada mekanisme harga (*a system of price-making market*). Namun persis di situ pula terletak soal yang secara langsung terkait dengan problematik ’ketertanaman’ dan ’ketercerabutan’ ekonomi.

Seperti telah disebut, prinsip ekonomi resiprositas dan redistribusi secara eksplisit tertanam dalam jaringan institusi yang dalam pengertian sekarang disebut berciri ”non-ekonomi”. Itulah yang rupanya menjamin aktivitas mata-pencapaian (arti substantif ’ekonomi’) tidak terlepas dari cara keseluruhan masyarakat melangsungkan hidupnya, baik tata kulturalnya (budaya), tata otoritas (politik), maupun teknologinya (teknologi). Lugasnya, ekonomi tidak terlepas dari politik, budaya, lingkungan dan sebagainya yang secara integral menyangga kelangsungan hidup masyarakat. Dengan lebih memperketat logika, ekonomi tidak terlepas dari urusan mata pencapaian warga dan keseluruhan cara *survival* masyarakat, persis karena secara eksplisit ditanam pada gugus institusi nilai-nilai yang berciri non-ekonomi. Andaikan aktivitas ekonomi diberi simbol A, maka aktivitas A tidak didasarkan pada A itu sendiri, tetapi pada

jaringan institusi B (misal: politik), C (misal: hukum), N (misal: adat istiadat) yang secara bersamaan menyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Singkatnya, ekonomi berciri merujuk kepada bidang lain (*other-referential*). Polanyi tidak menuliskan hal ini, tetapi pada hemat saya merupakan pokok sentral di belakang kritiknya terhadap pasar swatata.

Di sinilah mulai terlihat apa yang berbeda dengan prinsip 'transaksi' sistem pasar. Dengan mendasarkan diri pada mekanisme harga, padahal harga bukan sekedar medium tetapi penyebab transaksi, maka dapat dikatakan prinsip 'transaksi' tidak didasarkan pada gugus kelembagaan di luar dirinya, melainkan pada dirinya sendiri (*self-referential*). Lugasnya, ekonomi tidak ditanam pada apa yang "non-ekonomi", tetapi pada "ekonomi" itu sendiri. Itulah mengapa pendasarannya bersifat *self-referential* (homologi kategoris). Sifat merujuk-diri ini kira-kira dapat dianalogikan dengan contoh begini. Andaikan Anda seorang akademisi yang mengajukan suatu argumen dalam makalah, dan rujukan untuk pembuktian argumen itu seluruhnya tulisan-tulisan Anda sendiri. Ketika Anda ditanya dasar validitas argumen, Anda menjawab: "Argumen itu valid karena saya mengatakan valid, dan tulisan-tulisan saya sendiri mengatakan itu". Itulah ciri *self-referential*.

Hemat saya, ciri *self-referential* ini pula yang kemudian memperanakkan klaim swatata (*self-regulating*) sistem ekonomi pasar dan sifat solipsistik teori pilihan rasional mazhab neo-klasik. Contohnya, terhadap pertanyaan "bagaimana Anda tahu pilihan Anda benar?", jawabannya adalah "saya tahu itu benar karena saya memilihnya!" (solipsisme epistemik).⁹⁰ Dan, ketika pertanyaannya adalah bagaimana Anda tahu itu baik atau buruk, jawabannya: "Saya tahu itu baik karena saya memilihnya!" (solipsisme etis). Rupanya itulah mengapa,

seperti ditulis Nicole Biggart, ”kebanyakan ekonom menjelaskan satu gejala ekonomi dengan gejala ekonomi lain: apa kaitan antara produksi dan tarif, atau antara tarif dan perdagangan”.⁹¹

Jadi, di satu pihak transaksi berciri tertanam (*embedded*) dalam kelembagaan sistem pasar yang didasarkan pada mekanisme harga. Tetapi di lain pihak, ciri *self-referential* pendasaran itu membuat prinsip transaksi cenderung tercerabut (*disembedded*) dari kaitan dengan gugus kelembagaan lain yang secara keseluruhan menjadi prasyarat kelangsungan hidup masyarakat. Melalui proses inilah kemudian muncul klaim ciri swatata ekonomi pasar: kinerja aktivitas yang disebut ’ekonomi’ tidak perlu lagi dikaitkan atau didasarkan pada rujukan institusional di luar dirinya; apa yang ada dalam dirinya sudah mencukupi. Gejala apa yang terlibat dalam proses ketercerabutan ini?

5. TIGA LAPIS KETERCERABUTAN EKONOMI

Seperti telah disebut, Polanyi melihat proses itu mulai bergulung dalam rangkaian peristiwa yang membawa-serta komodifikasi tiga unsur alamiah penyangga sifat alami masyarakat, yaitu tanah (*land*), penanda pertukaran (*money*), dan tenaga kerja (*labour*).⁹² Dalam sungai sejarah, tentu saja sesuatu tidak terjadi mendadak dalam semalam. Tetapi dalam penelitian Polanyi, momentum lepas-landas itu bisa dikatakan terjadi pada deretan peristiwa yang akhirnya memuncak dalam penghapusan Undang-Undang Perlindungan Kaum Miskin melalui *The Poor Law Reform Act* tahun 1834 di Inggris.⁹³ Polanyi menulis: ”Reformasi undang-undang untuk kaum miskin 1834 itu menyingkirkan hambatan terakhir bagi penciptaan pasar tenaga kerja – hak untuk hidup dihapuskan”.⁹⁴ Sejak itu, ”jika seorang tidak hidup dengan bekerja bagi

upah, ia bukanlah manusia yang bekerja, tetapi seorang gembel”.⁹⁵ Penghapusan undang-undang jaminan sosial itu juga berarti pelepasan daya kerja manusia (*human labour*) dari perlindungannya oleh kelompok-kelompok gilda, reska komunitas Gerejani paroki, dan sistem perlindungan oleh kaum pemilik tanah. Dengan itu, daya kerja tidak lagi dikaitkan dengan kreativitas pemiliknya ataupun subsistensi hidup, tetapi pada mekanisme harga. Ringkasnya, dalam bahasa Polanyi, ”daya kerja manusia harus diubah menjadi komoditas”.⁹⁶

Karena ”komoditas adalah objek yang diproduksi untuk dijualbelikan di pasar”, padahal ”daya kerja manusia adalah hidup itu sendiri” yang tidak diproduksi oleh pasar,⁹⁷ maka komodifikasi daya kerja manusia adalah penjungkirbalikan prasyarat masyarakat sebagai relasi manusia. Dengan itu, masyarakat tidak lagi berupa ”relasi manusia” tetapi ”transaksi komoditas”. Seperti yang sebelumnya ditunjukkan Karl Marx, Polanyi melihat transformasi ini punya implikasi sedemikian besar. Dalam kaitannya dengan problematik ’ketertanaman’ dan ’ketercerabutan’ ekonomi, saya coba mengajukan tiga kategori dan lapis implikasi yang dibawa-serta.

Pada subuh proses transformasi di abad ke-19 itu, mulailah muncul kondisi ketika ”kelaparan atau kerja-bagi-upah menjadi satu-satunya alternatif bagi orang miskin”.⁹⁸ Karena kelaparan adalah jalan menuju kematian, padahal upah untuk membeli prasyarat kelangsungan hidup hanya dapat diperoleh dengan menjual tenaga kerja, maka segera muncul pula kondisi di mana soal hidup dan mati tergantung pada perolehan kerja-bagi-upah. Kerja-bagi-upah adalah istilah lain dari tenaga kerja sebagai komoditas. Namun komodifikasi tenaga kerja juga berarti perolehan mata-pencarian ditentukan bukan oleh kemurahan hati, tetapi oleh kecocokan harga. Dalam ungkapan Polanyi: ”Atas perintah

Undang-Undang [1834] itu, belas-kasih dicopot dari hati manusia”.⁹⁹ Karena kecocokan harga tenaga kerja tidak tergantung pada belas-kasih tetapi pada interaksi antara pasokan (*labour supply*) dan permintaan (*labour demand*) tenaga kerja, maka soal hidup dan mati bukan lagi urusan abstrak melainkan ditentukan secara riil oleh pasar tenaga kerja (*labour market*). Proses yang paralel juga terjadi pada tanah dan uang yang ”ketersediaannya ditentukan oleh mekanisme pasar swasta” yang juga dikenakan pada uang (*money market*) dan tanah (*land market*).¹⁰⁰ Harga tenaga kerja disebut upah (*wages*), untuk uang disebut bunga (*interest*), dan untuk tanah adalah sewa (*rent*).¹⁰¹ Maka, ”segera muncullah kaum proletariat industrial”.¹⁰²

Dengan itu proses organisasi mata-pencarian (definisi substantif ’ekonomi’) tidak lagi terkait dengan jaringan koordinasi institusional kelangsungan seluruh masyarakat, tetapi dengan fluktuasi harga yang kinerjanya ditentukan lebih lanjut oleh sistem swasta harga-harga. Rumusan panjang Polanyi berikut ini menggambarkan pokok itu:

”Ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang dikendalikan, diatur dan diarahkan harga pasar... Ekonomi seperti ini didasarkan pada tuntutan bahwa manusia bertindak sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam nilai uang... Produksi juga dikendalikan oleh harga, sebab laba bagi mereka yang mengarahkan produksi bergantung pada harga itu; distribusi barang/jasa juga bergantung pada harga, karena harga membentuk *income*, dan melalui *income* inilah barang/jasa diproduksi dan didistribusikan di antara warga masyarakat. Semuanya bersandar pada harga. Ciri swasta sistem ini menunjuk pada fakta bahwa semua produksi dilakukan untuk jual-beli di pasar, dan semua bentuk *income* berasal dari jual-beli. Hal ini tidak akan berjalan kecuali semua hal lain juga punya harga dan masuk ke dalam mekanisme pasar; bukan

hanya barang/jasa tapi juga tenaga kerja, tanah, dan uang; harga mereka masing-masing disebut upah, sewa, dan bunga”.¹⁰³

Justru karena dari logika internal kinerjanya ciri swatata mensyaratkan komodifikasi atas semua barang/jasa lain, maka sistem pasar swatata bergerak secara ekspansif melalui kolonisasi atas berbagai bidang yang sebelumnya tidak terjamah mekanisme harga. Itulah mengapa benteng terakhir, yaitu daya kerja manusia (*human labour*), pada akhirnya juga ditentukan oleh mekanisme harga. Melalui proses itu, ekonomi pasar (*market economy*) menjadi prinsip integratif seluruh masyarakat dan pada akhirnya masyarakat juga berubah menjadi masyarakat pasar (*market society*). Tulis Polanyi: ”Pola institusional itu tidak mungkin bisa berjalan kecuali tata masyarakat dikebawahkan pada tuntutan-tuntutannya. Ekonomi pasar hanya dapat hidup dalam masyarakat pasar”.¹⁰⁴ Atau, ”semua gejala itu kurang-lebih meringkas genealogi masyarakat pasar”.¹⁰⁵

Dengan itu, apa yang dibawa-serta bukan hanya kondisi sosiologis baru tetapi juga sebuah antropologi baru. Arti substantif ekonomi sebagai organisasi mata pencaharian tersingkir menjadi bayang-bayang yang tipis, karena sekarang sistem pasar swatata telah menetapkan bagaimana mata-pencaharian mesti diperoleh/dilakukan. Mata-pencaharian yang mutlak dibutuhkan untuk bertahan hidup hanya diperoleh dengan menjual tenaga kerja (*labour*). Tetapi karena tak ada orang yang akan membeli tenaga kerja apabila tidak melihat prospek laba (*profit*), maka soal bisa-makan atau tidak-bisa-makan ditentukan oleh ada-tidaknya prospek laba:

”Bila seorang buruh, ia harus menjual tenaga kerjanya pada harga pasar; jika seorang pemilik, ia harus membuat laba setinggi yang ia bisa, karena posisi di antara sesamanya tergantung pada tingkat penghasilannya. Ke-

laparan (*hunger*) dan keuntungan (*gain*)... yang membuat baik buruh maupun pemilik membajak dan menabur, memintal dan menenun, menambang dan membakar arang, serta mengemudikan pesawat terbang. Dengan demikian, warga masyarakat seperti itu akan memikirkan dirinya digerakkan oleh motif kembar tersebut”.¹⁰⁶

Itulah mengapa istilah 'ekonomi' kemudian identik dengan 'sistem pasar'. Di tempat lain Polanyi merumuskannya dengan ungkapan begini:

”Fiksi tentang komoditas telah menyerahkan nasib manusia dan alam ke dalam bulan-bulanan otomaton yang bergerak menurut jalurnya sendiri dan menurut hukumnya sendiri..., dikendalikan melulu oleh insentif kelaparan (*hunger*) dan keuntungan (*gain*) – atau, lebih tepat, oleh ketakutan akan ketidakpunaan prasyarat dasar hidup ataupun oleh hasrat akan laba”.¹⁰⁷

Jika proses itu membentuk cara berpikir semua kelas sosial (entah kaya atau miskin, majikan atau buruh), maka ia juga punya daya pembentuk atas semua sudut kehidupan masyarakat,¹⁰⁸ bahkan menentukan apa yang menjadi masalah dan bukan-masalah dalam masyarakat. Dalam penelitian historis, Polanyi salah satunya menemukan bahwa dengan kemunculan sistem pasar swata-
ra, 'kemiskinan' (*pauperism*) lalu didefinisikan sebagai masalah besar yang melibatkan perdebatan banyak pemikir, dari Bentham, Malthus, Townsend, Burke, Owen, sampai kelompok-kelompok agama.¹⁰⁹

”Tenaga kerja mesti dilihat sebagai komoditas dengan harga pasar. Dalil perdagangan adalah hukum kodrat, karena itu juga hukum Allah. Bukankah itu tidak lain kecuali langkah naik banding dari instansi lebih rendah ke instansi yang lebih tinggi, dari tata ketenangan ke jeritan kelaparan? Untuk para politisi dan administrator, *laissez-faire* merupakan prinsip penjamin hukum dan ketertiban dengan biaya sesedikit mung-

kin. Biarkan pasar mengatur kaum miskin, maka selebihnya akan beres. Persis pada pokok inilah Bentham, si rasionalis, sepakat dengan Burke, si tradisional... Bila kelaparan (*hunger*) dapat membereskan urusan, hukuman (*penalty*) tidaklah dibutuhkan”.¹¹⁰

Atau, ”keputusan terbukti menjadi pelaku yang lebih kuat bagi transformasi”.¹¹¹ Dalam kondisi ini perilaku tidak-bisa-tidak tampak ditentukan sepenuhnya oleh motif ”ekonomi”, dan dari situlah berkembang determinisme ekonomi.¹¹² Tentu saja, manusia *de facto* tidak hanya digerakkan oleh kelaparan dan laba. Jika secara ketat kondisi *de facto* manusia menjadi dasar bagi konsepsi teoretis, tentulah konsepsi ’makhluk ekonomi’ merupakan kesesatan besar yang dengan mudah dapat ditelanjangi. Polanyi menunjukkan kesesatan itu dengan rumusan dan metafor sangat menarik:

”Sebagaimana institusi keluarga tak didasarkan pada motif seks, begitu pula pemenuhan kebutuhan seseorang dan keluarganya tidak didasarkan pada motif kelaparan. Seks, seperti halnya kelaparan, adalah salah satu insentif paling kuat jika dibiarkan liar tanpa dikendalikan insentif-insentif lain. Itulah mengapa keluarga, dalam berbagai bentuknya, tidak pernah dibiarkan berpusat hanya pada insting seksual..., tetapi pada kombinasi sejumlah motif kuat lain yang mencegah seks dari kecenderungannya menghancurkan institusi keluarga yang menjadi sumber banyak unsur kebahagiaan manusia. Pada dirinya, seks semata tidak pernah menghasilkan apa pun melebihi tempat pelacuran... Sebuah sistem ekonomi yang menyandarkan kinerjanya pada kelaparan [dan laba] sama gila dengan sistem keluarga yang didasarkan pada dorongan seks”.¹¹³

Namun, sekali lagi soalnya bukan apakah *de facto* manusia hanya digerakkan oleh lapar dan laba. Karena dalam konsepsi ekonomi pasar swatata ”kelaparan dan laba kini menjadi penggerak organisasi mata-pencarian, manusia

terpaksa mengenakannya setiap hari, sementara motif-motif lain lalu tampak asing dan tersisih dari kehidupan”. Dengan itu, ”kehormatan dan harga diri, tugas sebagai warga negara dan kewajiban moral, bahkan martabat dan kesantunan, semua itu kemudian terlihat tidak relevan bagi produksi”.¹¹⁴ Itulah maksudnya ketika Polanyi menulis dengan ungkapan berikut:

”Sebutkan motif apa pun yang kamu suka. Lalu lakukan proses produksi sedemikian rupa yang membuat motif itu jadi insentif seseorang untuk memproduksi. Maka kamu akan peroleh sebuah gambar manusia yang diserap oleh motif tertentu itu. Itu berlaku entah motif tersebut berupa motif agama, politis, ataupun estetis; entah motif itu berupa gengsi, prasangka, cinta-kasih, ataupun dengki. Maka secara hakiki seorang juga akan tampil sebagai religius, politis, estetis, congkak, penuh prasangka, atau sebagai orang yang terbenam dalam cinta-kasih atau kedengkian. Sebaliknya, motif-motif lain akan kelihatan jauh dan seperti bayang-bayang tipis, sebab motif-motif itu tidak bisa dipakai sebagai penggerak dalam urusan pokok produksi. Motif tertentu yang dipilih itu akan merepresentasikan manusia riil”.¹¹⁵

Seperti yang terjadi pada komoditas fiktif, begitu pula gambaran tentang ”makhluk ekonomi” itu adalah fiksi. Dan, sebagaimana tanah, tenaga kerja dan uang yang awalnya bukan komoditas akhirnya menjadi komoditas, begitu juga fiksi makhluk ekonomi ini akhirnya menjadi realitas faktual. Tetapi, bagaimana mungkin sesuatu yang fiktif berubah menjadi faktual? Perubahan ini tentu mustahil dalam ilmu-ilmu alam. Namun perubahan itu dengan mudah dapat dijelaskan dengan melihat kekhasan hubungan antara pemikiran dan obyek pemikiran dalam ilmu-ilmu sosial. Ekonom Stefano Zamagni menjelaskan itu dengan rumusan berikut:

”Perumusan teori baru mengenai gejala alam tidak mengubah jalannya gejala alam tersebut; perumusan itu tidak berpengaruh pada kebenaran atau kekeliruan daya ramal yang terkandung dalam teori tersebut. Tidak demikian halnya dengan ilmu ekonomi, karena ramalan ilmu ekonomi, misalnya bahwa dua tahun lagi akan terjadi *boom*, dapat menyebabkan *overproduction*, yang pada gilirannya menyebabkan resesi”¹¹⁶

Lugasnya, soalnya dengan gambaran fiktif tentang makhluk ekonomi bukan bahwa gambaran itu hanya rekaan, tetapi karena gambaran itu (sefiktif apa pun) merupakan proyek normatif tentang bagaimana manusia *harus* menjadi. Apakah makhluk seperti itu sungguh ada dalam kenyataan bukanlah masalahnya. Melalui gambaran fiktif itu, agenda pemikiran ekonomi swatata persis membuatnya menjadi fakta. Dalam bahasa Polanyi:

”Pentingnya pandangan ekonomistik persis terletak dalam kemampuannya melahirkan kesatuan motivasi dan valuasi yang membuatnya menjadi tindakan/praktik nyata seperti yang ditetapkan oleh yang seharusnya, yaitu agar semua unsur yang terkait, termasuk di dalamnya gambaran tentang batin manusia dan hakikat masyarakat – sebuah filsafat tentang hidup sehari-hari yang berisi kriteria perilaku yang waras, risiko yang masuk akal dan moralitas yang praktis. Dengan itu kita disodori satu-satunya kumpulan doktrin teoretis dan praktis yang akan menghasilkan sebuah masyarakat..., atau mengubah masyarakat yang ada sekarang menurut gambarannya dalam rentang waktu satu atau dua generasi”¹¹⁷

Justru karena berupa proyek normatif, gambaran fiktif tersebut ”berisi benih-benih bagi munculnya seluruh kebudayaan”¹¹⁸

Jadi, rupanya yang dibawa-serta oleh proses itu adalah beberapa lapis ketercerabutan berikut. *Pertama*, setelah mata-pencaharian diorganisasikan

atas dasar mekanisme harga, urusan mata-pencapaian juga tercabut dari gugus tata kelembagaan lain di luar harga. Karena organisasi mata-pencapaian adalah arti substantif ekonomi, hal itu juga berarti 'ekonomi' dicabut dari kaitan integralnya dengan gugus tata kelembagaan lain di luar harga. Bolehlah gejala ini disebut sebagai ketercerabutan sosiologis. Rupanya inilah arti mendasar ketercerabutan ekonomi yang paling dekat dengan maksud Polanyi.¹¹⁹

Kedua, bersamaan dengan itu juga berlangsung ketercerabutan antropologis. Karena sumber pencapaian yang menyangga kelangsungan hidup ditentukan oleh mekanisme harga (upah), maka urusan hidup dan mati juga ada di bawah penentuan harga. Namun karena upah tidak akan diperoleh kecuali tersedia pengupahan, padahal pengupahan tidak akan tersedia kecuali ada prospek laba, maka organisasi mata-pencapaian berlangsung di bawah penentuan motif lapar (*hunger*) dan laba (*profit*). Manusia dalam momen ekonomi kemudian tampil sebagai makhluk yang digerakkan oleh motif lapar dan laba. Ekonomi tak lagi berurusan dengan kelangsungan hidup seluruh masyarakat, tapi menciut menjadi momen tindakan individual yang digerakkan oleh motif lapar dan laba. Hollis dan Nell berkesimpulan bahwa "ekonomi adalah studi bukan tentang ekonomi dan bukan tentang manusia, tetapi tentang makhluk ekonomi".¹²⁰ Polanyi menyebut hal ini dengan istilah "solipsisme ekonomi".¹²¹

Ketiga, ketercerabutan sosiologis dan antropologis itu disangga oleh ketercerabutan lain yang bersifat epistemik. Di sinilah terletak pentingnya kajian Polanyi tentang dua arti 'ekonomi'. Ia membedakan arti formal (*formal meaning*) dari arti substantif (*substantive meaning*). Arti substantif ekonomi "berakar dari fakta ketergantungan mata-pencapaian manusia pada sesama dan alam", dalam arti interaksi dengan tata lingkungan alam dan sosial itu

membawa pengadaan sarana-sarana bagi kebutuhan hidup.¹²² Sedangkan arti formal ekonomi ”berasal dari proses logika yang menyangkut kaitan antara sarana (*means*) dan tujuan (*ends*), sebagaimana tampak dalam pemakaian kata-kata ’ekonomis’ (*economical*) dan ’menghemat’ (*economising*).”¹²³ Arti formal menetapkan soal ekonomi adalah urusan pilihan yang tidak-bisa-tidak (harus) diambil karena pengandaian bahwa ketersediaan sarana selalu ditandai kelangkaan. Lugasnya, ”arti formal adalah soal logika (*logic*)”, sedangkan ”arti substantif itu soal fakta (*fact*)”; yang pertama ”urusan pikiran (*mind*)”, yang kedua ”urusan kodrat alamiah (*nature*)”.¹²⁴

Apa urusan perbedaan itu dengan soal ketercerabutan ekonomi? Menurut Polanyi, pokok soalnya adalah bahwa kedua arti itu dicampuradukkan.¹²⁵ Hemat saya, masalahnya bukan bahwa kedua arti ekonomi itu dicampuradukkan, melainkan bahwa arti substantif ekonomi dihapus dan seluruhnya diganti dengan pengertian ’ekonomi’ menurut definisi formal. Itulah mengapa ekonomi tak lagi diartikan sebagai organisasi mata-pencapaian, tetapi ekonomi sama dengan aktivitas sistem pasar. Seperti telah disebut, dengan itu organisasi mata-pencapaian (arti substantif ’ekonomi’) sebelum munculnya sistem pasar juga dianggap bukan ekonomi dan bukan bagian sejarah ekonomi. Implikasinya sangat jauh. Sebagaimana komodifikasi tanah, tenaga kerja dan uang merupakan komoditas fiktif, dan sebagaimana gambaran makhluk ekonomi yang digerakkan oleh lapar dan laba adalah antropologi fiktif, begitu pula pemikiran ekonomi yang menyamakan ’ekonomi’ dengan ’kinerja sistem pasar’ juga menghasilkan analisis ekonomi fiktif. Dalam bahasa Polanyi: ”Di luar sistem pasar yang didasarkan pada mekanisme harga, analisis ekonomi kehilangan seluruh relevansinya sebagai metode kajian atas kinerja ekonomi”.¹²⁶

Rupanya itulah juga mengapa berbagai analisis ilmu ekonomi *main-stream* dewasa ini lebih berurusan dengan kajian mekanika sistem pasar yang jauh dari urusan substantif mata-pencarian orang biasa. Dalam bahasa Giovanni Arrighi, "para ekonom tidak berurusan dengan ekonomi; mereka berurusan dengan model-model matematis yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi".¹²⁷ Itu pula mengapa paket perubahan dalam rupa "penyesuaian struktural" (*Structural Adjustment*) yang gencar dilakukan sejak dasawarsa 1990-an berisi aplikasi sistem pasar pada berbagai bidang yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya bergerak berdasarkan prinsip pasar, seperti pendidikan, kesehatan, air, sumber daya alam, dan sebagainya.¹²⁸ Dengan kata lain, model perubahan ala *Structural Adjustment* merupakan larangan melakukan proses pembangunan di luar model sistem pasar swatata.

Proses bagaimana makna substantif ekonomi dihapus dan diganti dengan pengertian formal tentulah melibatkan penjelasan kompleks yang menuntut topik bahasan tersendiri. Namun bisa dikatakan bahwa di jantung penggantian itu berlangsung satu langkah kunci, yaitu dimasukkannya suatu faktor yang Polanyi sebut "postulat kelangkaan" (*scarcity postulate*).¹²⁹ Postulat kelangkaan bisa dipahami dengan cara ringkas begini. Seandainya pun berbagai sumberdaya untuk hidup (seperti air, udara, biji-bijian) secara faktual tidak langka, sistem pasar menuntut kelimpahan sumberdaya itu (*abundance*) diubah menjadi langka (*scarcity*). Caranya dengan membuat sumberdaya itu menjadi komoditas, hingga akses ke berbagai sumberdaya itu hanya bisa diperoleh dengan membayar harga. Maka, ketersediaan/pengadaan sumberdaya tidak lagi bergantung apakah secara faktual/material sumberdaya itu memang ada, tetapi kini bergantung pada kesanggupan membayar harga (*purchasing power*). Itulah

mengapa apa yang disebut aktivitas mata-pencarian (arti substantif 'ekonomi') menjadi urusan "sekuensi tindakan memilih secara hemat, yaitu pilihan-pilihan yang terpaksa dilakukan karena diciptakannya situasi kelangkaan".¹³⁰

Jadi melalui satu langkah aplikasi logika tentang kelangkaan, arti substantif ekonomi diubah secara mendalam menurut arti formal. Inilah lapis ketiga ketercerabutan: bukan hanya hakikat ekonomi dicabut dari arti substantifnya (ketercerabutan ontologis), tetapi dengan itu cara memikirkan ekonomi juga tercerabut (ketercerabutan epistemik). Maka, seperti didefinisikan oleh Lionel Robbins, kini "ekonomi mempelajari perilaku manusia sebagai kaitan antara tujuan (*ends*) dan sarana langka (*means*) yang mempunyai banyak alternatif kegunaan".¹³¹ Polanyi menunjukkan bagaimana perjalanan definisi baru tentang ekonomi ini menyembunyikan manipulasi konsep:

"Teori Ekonomi Neoklasik disusun sekitar tahun 1870... salah satunya atas dasar karya Carl Menger (*Grundsätze, Principles*, 1871): bahwa fokus ilmu ekonomi adalah alokasi sarana-sarana yang ketersediaannya tak mencukupi untuk memenuhi mata-pencarian manusia. Inilah deklarasi pertama dari postulat kelangkaan dan maksimalisasi... Tapi, kemudian Menger melengkapi *Principles*-nya agar tidak memberi kesan mengabaikan masyarakat-masyarakat purba, kuno dan masa lalu yang mulai dipelajari sistematis oleh ilmu-ilmu sosial. Antropologi budaya menemukan beragam motivasi nirlaba yang menggerakkan manusia dalam produksi; temuan-temuan sosiologi membantah mitos keluasan cara berpikir utilitarian; ilmu sejarah kuno berkisah tentang budaya-budaya tinggi dengan tingkat kemakmuran tinggi, tetapi tanpa sistem pasar. Menger sendiri berpendapat bahwa sikap-sikap maksimalisasi hanya berlaku secara terbatas pada nilai utilitarian... Dengan hati-hati ia membatasi penerapan *Principles* pada ekonomi sistem pasar modern (*Verkehrswirtschaft*). Ia melarang cetakan ulang dan terjemahan edisi

pertama *Principles* yang dianggapnya belum selesai. Ia mundur dari Universitas Vienna untuk membaktikan diri pada tugas ini. Setelah usaha 50 tahun..., ia meninggal dan meninggalkan manuskrip revisi yang diterbitkan di Vienna tahun 1923. Edisi kedua *Principles* penuh dengan catatan tentang perbedaan antara bentuk-bentuk ekonomi non-pasar dan ekonomi pasar; hanya bagi ekonomi pasar buku *Principles* berlaku...¹³²

Edisi *Principles* yang diterbitkan sesudah Menger wafat ini berisi 4 bab yang sama sekali baru. Salah satu bab membedakan dua corak ekonomi: "yang satu maksimalisasi yang digagas dari kelangkaan sarana, sedangkan yang lain tekno-ekonomi yang berasal dari tuntutan produksi bagi kelangsungan hidup, entah ada masalah kelangkaan sarana atau tidak".¹³³ Edisi baru inilah (panjangnya dua kali lipat dari edisi pertama) yang tidak pernah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Edisi bahasa Inggris tahun 1933 hanya memilih versi tahun 1871, dan F. A. Hayek yang memberi Pengantar "membantu menyingkirkan edisi pasca-wafat Menger tersebut dari kesadaran para ekonom dengan menulis bahwa manuskrip pasca-wafat itu berciri terpecah-pecah dan tidak beraturan".¹³⁴ Semenjak itu, "Ekonomi Neoklasik berdiri di atas arti baru ekonomi, sedangkan arti lama yang material dan substantif menghilang dari kesadaran dan kehilangan kekuatannya bagi pemikiran ekonomi".¹³⁵

Dengan itu lengkaplah ketercerabutan sosiologis, antropologis dan epistemik. Seperti diisyaratkan Menger dalam edisi pasca-wafat, Polanyi juga melihat tidak benarlah bahwa ekonomi dimulai dari kondisi kelangkaan, seperti yang ditetapkan oleh cara berpikir ekonomi dewasa ini. Yang benar, kondisi kelangkaan itu disyaratkan (*postulated*) oleh pengenaaan harga. Maka, seketika harga (*price tag*) dikenakan pada suatu barang/jasa, seketika itu pula

barang/jasa tersebut menjadi langka, karena ketersediaannya kemudian tergantung pada daya beli (*purchasing power*) – tidak peduli apakah secara empirik dan faktual barang/jasa itu memang langka atau melimpah. Hanya dengan itu 'ekonomi' menjadi urusan maksimalisasi penggunaan sarana yang langka bagi suatu tujuan.

Tetapi bahkan dari dalam logika internal cara berpikir ala ekonomi itu dengan mudah dapat ditunjukkan sebuah kesesatan besar. Baik tujuan (*ends*) maupun sarana (*ends*) tentu bukan sesuatu yang khas ekonomi. Sebab, urusan sarana-tujuan juga berlaku bagi banyak tindakan lain:

”Seorang jenderal yang menugaskan pasukannya untuk berperang, pemain catur yang sedang berhitung untuk mengorbankan pion, pengacara yang mengerahkan bukti-bukti untuk membela klien, seorang seniman yang mengerahkan efek pada karyanya, seorang beriman yang menandai buku doa dan amalnya untuk mencapai keselamatan, ataupun... seorang istri hemat yang sedang merencanakan daftar belanja minggu ini”.¹³⁶

Contoh-contoh itu menunjukkan betapa urusan pilihan tujuan-sarana bukan kekhasan kegiatan ekonomi. Maka juga jelas bahwa, dalam bahasa Polanyi, ”arti formal *ekonomi* sebenarnya hanya terhubung secara sangat kebetulan dengan arti substatif ekonomi”.¹³⁷ Kebanyakan urusan dalam contoh-contoh di atas bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai urusan ekonomi. Akan tetapi, seperti telah disebut, persis di situlah letak proyek normatif ilmu ekonomi: soalnya bukan apakah isi analisisnya faktual, tetapi bagaimana agar yang fiktif sekalipun menjadi faktual. Itulah mengapa ekonom Gary Becker kemudian menulis bahwa ”ekonomi menyediakan semesta pendekatan untuk memahami *semua* perilaku manusia”.¹³⁸ Ekonom Jack Hirshleifer memakai istilah ”cara me-

lihat di terowongan” untuk mengkritik kecenderungan kebanyakan ekonom yang bersikukuh dengan gagasan berikut:

”Hanya ada satu ilmu sosial. Apa yang membuat ekonomi punya kekuatan imperialistik yang invasif adalah karena kategori analitik kami – kelangkaan, biaya, preferensi, kesempatan, dan sebagainya – sungguh-sungguh punya aplikasi universal. Bahkan lebih penting lagi adalah pengaturan konsep-konsep kami secara terstruktur ke dalam proses optimalisasi pada lingkup individual. Karena itu, ilmu ekonomi benar-benar merupakan tata-bahasa universal ilmu-ilmu sosial.”¹³⁹

Tanpa memahami masalah besar yang ditunjukkan Polanyi, sangat mudah kita salah membaca pernyataan seperti di atas sebagai pernyataan deskriptif, padahal yang sedang diajukan adalah proyek normatif.¹⁴⁰ Justru karena definisi ekonomi secara kategoris tidak khas menyangkut yang ”ekonomi”, segera berlangsung kolonisasi ilmu ekonomi atas ilmu-ilmu sosial lain. Atau dalam bahasa Hirshleifer di atas: ”ilmu ekonomi menjadi tata-bahasa universal ilmu-ilmu sosial”.¹⁴¹ Manifesto imperialisme epistemik itu ditulis George Stigler dengan rumusan demikian:

”Heinrich Gossen, imam agung teori *utility-maximizing behaviour*, membandingkan lingkup teori tersebut dengan teori Copernicus mengenai gerak benda-benda langit. Benda-benda langit berperilaku lebih teratur daripada manusia, tetapi sangat mungkin fantasinya akan terpenuhi dengan penyebaran dan perentangan teori para ekonom tentang perilaku manusia ke semua bidang ilmu-ilmu sosial”.¹⁴²

Maka, secara ringkas dapat dikatakan bahwa ketercerabutan sosiologis, antropologis dan epistemik ini membuat aktivitas ekonomi dan ilmu ekonomi terasing dari urusan mata-pencarian manusia (arti substantif ’ekonomi’), dan

bersama itu juga melahirkan kecenderungan kolonisasi ilmu ekonomi atas bidang lain dalam ilmu-ilmu sosial lain. Dalam *GT*, Polanyi menuliskan pokok itu dengan rumusan demikian:

”Menengok ke belakang, bisa dikatakan tidak ada kekeliruan membaca masa lalu yang pernah punya daya profetik atas masa depan daripada konsep manusia ekonomi. Sampai zaman Adam Smith, kecenderungan dan ciri manusia ekonomi begitu jarang ditemukan dalam skala hidup komunitas, dan paling banter hanya menjadi ciri sporadis kegiatan ekonomi. Seratus tahun kemudian, ...manusia ekonomi dengan kecenderungan dan cirinya secara praktis dan teoretis ada di belakang seluruh kegiatan ekonomi, untuk tidak mengatakan juga di balik kegiatan politis, intelektual, dan spiritual”.¹⁴³

Konteks kalimat di atas adalah Polanyi yang sedang mempertanyakan argumen Adam Smith bahwa sejak dari kandungan, manusia telah ditandai kecenderungan kodrati bertransaksi untuk mendapatkan laba/keuntungan.

Konsepsi ekonomi pasar juga konsepsi manusia dan masyarakat pasar. Pembentukan ekonomi pasar juga pembentukan manusia dan masyarakat pasar. Maka sampailah kita ke kondisi hari ini.

6. PROSPEK MENANAM KEMBALI EKONOMI

Juga seandainya tiga lapis ketercerabutan di atas membantu kita memahami corak kehidupan ekonomi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini, lobang persoalan tetap menganga. Seperti disebut, jika semua bentuk ekonomi tidak-bisa-tidak selalu tertanam dalam gugus tata kelembagaan, maka argumen tentang sistem ekonomi pasar sebagai ekonomi yang tercerabut pastilah klaim kosong

yang tidak punya isi substantif. Bahwa ia disebut dengan istilah 'swatata' (*self-regulating*) samasekali tidak membuktikan bahwa secara faktual ia berdiri pada dirinya sendiri. Sebagaimana juga telah disebut, bukankah ciri *self-referential* ini yang memudahkannya menjadi proyek normatif mencaplok, yaitu dengan mengubah apa saja yang ada di depannya menurut gambaran dirinya? Lugasnya, komodifikasi hukum, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, air, udara, biji-bijian, relasi manusia dan sebagainya. Dalam istilah sekarang, gejala itu disebut fundamentalisme pasar. Maka, sekurangnya ada dua kemungkinan pemahaman.

Pertama, sistem ekonomi pasar bukanlah modus ekonomi yang tercerabut. Ia tetaplah modus ekonomi yang tertanam, juga meskipun ia disebut 'swatata', dan juga meskipun ketertanaman itu beroperasi dalam gugus-gugus institusi yang sifatnya *self-referential*, seperti institusi harga, laba, pasar uang, pasar kerja, saham, perbankan, ataupun hak milik pribadi. Akan tetapi, seperti juga telah disebut, ciri ketertanaman yang merujuk-diri (*self-referential*) itulah yang rupanya memperkecil kemungkinan kaitan ekonomi dengan urusan mata-pencaharian kebanyakan orang maupun dengan keseluruhan proses *survival* masyarakat. Dalam arti inilah istilah "ketercerabutan sistem ekonomi pasar swatata" perlu dipahami. Diskoneksi antara sektor keuangan (*financial sector*) dan sektor riil (*real sector*) yang makin luas terjadi dalam beberapa dasawarsa ini adalah contoh yang begitu nyata.¹⁴⁴ Dalam penelitian rinci dan kuantitatif atas masalah ini, Gérard Duménil dan Dominique Lévy menunjukkan bagaimana "sektor keuangan dewasa ini beroperasi sebagai benalu terhadap ekonomi". Sektor "keuangan itu memberi keuntungan siapa?" Jawabnya: "Sektor finansial hanya menguntungkan dirinya sendiri".¹⁴⁵ Frekuensi krisis finansial seiring ledakan industri keuangan sejak paroh dasawarsa 1970-an. Dari tahun 1945

sampai 1971, misalnya, hanya terjadi 38 krisis keuangan, sedangkan antara 1973 dan 1997 terjadi 139 krisis keuangan global, atau 366 persen lonjakan.¹⁴⁶

Kedua, garis pemikiran Polanyi rupanya mengisyaratkan perspektif berikut. Tanpa secara eksplisit dilekatkan pada gugus kelembagaan di luar dirinya (*other-referential*), aktivitas ekonomi punya kemungkinan kecil terkait dengan urusan mata-pencarian kebanyakan orang (arti substantif 'ekonomi') maupun dengan keseluruhan tata *survival* masyarakat. Setidaknya secara teoretik, pelekatan pada gugus nilai institusional di luar dirinya itu menjamin agar aktivitas ekonomi dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh nilai-nilai yang tidak hanya berciri "ekonomi". Bahkan dari logika internal liberalisme sendiri, tidaklah sulit memahami mengapa pokok ini sangat penting.

Liberalisme berdiri di atas premis keanekaragaman nilai. Institusi judikatif, misalnya, merupakan pembedaan nilai 'keadilan' (*justice*), sebagaimana halnya institusi sekolah membadankan nilai-nilai 'pendidikan' (*education*). Membiarkan institusi pengadilan dan sekolah didasarkan terutama pada logika 'ekonomi' adalah resep menuju penghapusan dasar keragaman yang secara bersama-sama menyangga kelangsungan masyarakat. Itulah mengapa sifat solipistik sistem pasar swasta justru merupakan bentuk "penutupan diri" terhadap kemungkinan agar ekonomi tetap terkait erat dengan urusan mata-pencarian banyak orang dan urusan *survival* seluruh masyarakat. Seperti ditulis Polanyi, realitas "kinerja institusi konkret selalu membenci motif-motif murni tunggal".¹⁴⁷ Dalam bahasa Harvey, "diferensiasi bukan berarti berlakunya prinsip murni, ataupun abstraksi "yang ekonomi" secara total. Banyak hal lain bekerja bahkan di tempat kerja, bahkan di tempat kerja yang paling berdedikasi dan tempat kerja yang ditandai eksploitasi ganas sekalipun".¹⁴⁸

Tetapi, modus-modus ketertanaman di luar dirinya seperti apa yang memungkinkan ekonomi pasar lebih erat terkait dengan urusan mata-pencaharian kebanyakan orang dan urusan *survival* seluruh masyarakat? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada satu masalah penting yang perlu dijernihkan.

Bila agendanya adalah "menanam kembali" ekonomi pasar, bukankah itu sama dengan diam-diam mengakui ada realitas 'pasar' (*market*) yang secara ontologis terpisah dari ketercampuran institusional dengan berbagai bidang lain seperti politik, budaya, hukum, dan sebagainya? Dan karena itu lalu perlu ditanam? Namun jika begitu, agenda "menanam kembali" justru tidak akan pernah mungkin, sebab secara konseptual tetap mengakui adanya realitas 'pasar' yang berada di luar ketercampuran institusional masyarakat. Itulah persoalan yang diajukan Greta Krippner: "Konsep ketertanaman (*embeddedness*) mengakui adanya entitas pasar yang terpisah dari masyarakat, bahkan ketika konsep ketertanaman yang sama berusaha mengatasi pasar".¹⁴⁹ Akibatnya, agenda menanam kembali ekonomi akan mustahil, karena secara abadi akan dihantui oleh "konflik antara konsepsi sosial tanpa pasar (*marketless conceptions of the social*) dan konsepsi ekonomi yang memberangus yang sosial (*conceptions of economy in which every social trace is suppressed*)".¹⁵⁰ Lugasnya, "konstruksi pasar yang asosial akan terjaga utuh..., seolah-olah pasar itu sendiri tidak menjelmakan relasi-relasi sosial yang tercampur-baur".¹⁵¹

Justru karena itu konsep Polanyian tentang ketertanaman ekonomi perlu direvisi secara kritis. Jika tak mungkin ada modus ekonomi dan pasar yang tidak tertanam dalam "tata institusi dan relasi-relasi sosial yang tercampur baur", maka:

”Tertanam tidak mungkin berarti ’sosial’ dalam arti *berlawanan* dengan ’ekonomi’. Proses-proses ekonomi tidak menjadi kurang ’ekonomi’ ketika ditanam, atau tidak juga berarti menjadi lebih ’ekonomi’ ketika dice-rabut. Karena itu, ketercerabutan tentulah tidak sama dengan arti swata-ta. Bahkan lebih tidak mungkin lagi ’ekonomi pasar’ sama-dan-sebangun dengan ’ekonomi asosial’.¹⁵²

Pokok krusial ini membawa problematik ketertanaman ke tingkat kerumitan lebih tinggi. Maka kembalilah kita ke pertanyaan relevansi: modus-modus ketertanaman apa yang memungkinkan ekonomi pasar lebih terkait dengan urusan mata-pencaharian kebanyakan orang dan dengan urusan *survival* seluruh masyarakat?

Pada titik inilah kontroversi segera menyala kembali. Di antara banyak kemungkinan modus ketertanaman, pada hemat saya sekurangnya bisa diajukan modus-modus berikut: (1) ketertanaman pada gugus kelembagaan negara (*the State*), (2) ketertanamaan dalam proses pengembangan komunitas (*community development*), (3) ketertanaman epistemik (*epistemic embeddedness*), dan (4) ketertanaman moral (*moral embeddedness*). Modus-modus ketertanaman itu secara ringkas perlu dibahas satu per satu.

Pertama, ketertanaman dalam gugus institusi negara. Bahkan dengan luasnya klaim tentang irelevansi negara dalam ekonomi global, para pemikir se-rius tetap sepakat bahwa apa yang disebut ’ekonomi pasar’ hanya dapat berdiri di atas jaringan institusional tata-negara.¹⁵³ Itu berlaku bukan hanya pada periode pembentukannya, seperti yang terjadi di Eropa Timur pasca-1989 atau yang sekarang sedang berlangsung di China. Bahkan pada kinerja ekonomi pasar ta-hap lanjut, ketertanaman dalam tata negara itu amat jelas, seperti terbukti da-

lam berbagai penyelamatan kolosal (*bailout*) bisnis oleh negara sejak pecahnya krisis kredit beracun perumahan di Amerika Serikat pada tahun 2007.¹⁵⁴ Keter-tanaman ekonomi pasar dalam gugus kelembagaaan negara hanya menyatakan apa yang sudah terang-benderang.

Bagaimana mungkin terjadi kontrak dan hak milik pribadi jika tidak ada kerangka hukum apa pun? Bagaimana mungkin terjadi pasokan uang pada tingkat yang konstan (*money supply*) tanpa adanya Bank Sentral? Bagaimana pasar tenaga kerja (*labour market*) menurut kualifikasi pendidikan dimung-kinakan apabila tak ada sistem pendidikan publik? Daftar ini bisa diperpan-jang, dan semua menunjuk fakta terang-benderang bahwa "ekonomi pasar secara politis senantiasa tertanam dalam lembaga tata negara".¹⁵⁵ Sudah dalam *GT*, Polanyi menuliskan "bahkan bisnis kapitalis sendiri mesti dilindungi dari keganasan mekanisme pasar", dan "bank sentral modern sesungguhnya adalah perangkat perlindungan; tanpa itu sistem pasar niscaya menghancurkan anak-anaknya sendiri, yaitu berbagai macam usaha bisnis".¹⁵⁶ Berbeda dengan klaim pasar swatata, "pemisahan politik dan ekonomi tidak mungkin sepenuhnya ter-jadi, dan itu terbukti dalam urusan uang; negara, dengan mencetak uang, sebe-narnya adalah penjamin nilai mata uang".¹⁵⁷ Pentingnya "Bank Sentral sebagai institusi negara persis terletak dalam fakta bahwa kebijakan moneter bukan terutama perkara ekonomi, tapi menyangkut urusan politik".¹⁵⁸

Dengan itu, soalnya bukan apakah ekonomi pasar perlu tertanam dalam tata institusi negara, tetapi ketertanaman seperti apa (dalam institusi negara) yang membuat kinerja ekonomi pasar lebih erat terkait dengan urusan mata-penca-harian warga biasa dan tata *survival* suatu masyarakat. Tidak sulit menemukan contoh dalam sejarah, salah satunya adalah Ekonomi Pasar Sosial (*soziale Mark-*

twirtschaft) yang melandasi pembangunan kembali Jerman Barat setelah Perang Dunia II.¹⁵⁹ Di jantung Ekonomi Pasar Sosial adalah apa yang disebut *Vitalpolitik*, yaitu gugus tindakan politik untuk membentuk bingkai kultural, hukum dan kebijakan-kebijakan sosial bagi kinerja ekonomi pasar. *Vitalpolitik* juga sekaligus tindakan politik untuk mencegah terjadinya kolonisasi logika pasar atas bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, hukum, tenaga kerja, perumahan, dan sebagainya.¹⁶⁰ Itu berarti, kinerja ekonomi pasar sengaja dikawal dengan perangkat regulasi-regulasi sosial untuk menjamin keterkaitan aktivitas ekonomi dengan cita-cita kehidupan bersama. Seperti ditulis salah satu pencetus Ekonomi Pasar Sosial, Alfred Müller-Armack, itu karena kehidupan bersama "tidak mungkin diserahkan baik kepada kinerja *laissez-faire* maupun kepada garis komando".¹⁶¹

Jika pengertian konseptual masih belum jelas benar, arti lebih konkret ketertanaman ekonomi dalam gugus institusi negara rupanya menunjuk pada "siklus regulasi dan de-regulasi",¹⁶² atau juga "dialektika regulasi dan deregulasi yang menghasilkan jenis-jenis tertentu tata kelola ekonomi dalam struktur negara".¹⁶³ Seperti luas dicatat, di abad ke-20 masa keemasan (*the Golden Age*) ekonomi pasar dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan yang lebih merata terjadi sekitar tahun 1948 sampai 1973. Itulah masa ketika ekonomi pasar dikawal dengan berbagai regulasi sosial, hingga masa itu sering disebut 'liberalisme tertanam' (*embedded liberalism*).¹⁶⁴ Sesudahnya, terutama sejak akhir dasawarsa 1970-an, mulailah masa yang biasanya disebut periode neo-liberal yang ditandai oleh agenda deregulasi, privatisasi dan liberalisasi.¹⁶⁵ Ekonom Stiglitz menyebut periode itu sebagai "dasawarsa paling rakus dalam sejarah".¹⁶⁶ Perbedaan kedua periode itu adalah bahwa dalam masa liberalisme tertanam, "modal punya alamat".¹⁶⁷ Itu berarti:

”Secara mendasar struktur hukum, finansial dan politik pada masa itu mengharuskan modal beroperasi pada konteks di mana faktor-faktor kunci yang menentukan distribusi keuntungan ekonomi – suku bunga, tingkat upah, nilai tukar – terutama ditentukan di tingkat nasional melalui proses negosiasi segitiga (*tripartite*) antara pemodal, buruh dan negara”.¹⁶⁸

Ketertanaman ekonomi pasar dalam gugus institusi negara melalui regulasi sosial ini tentu mengandaikan banyak hal. Salah satunya adalah tingkat disiplin sangat tinggi pada aparatur negara, selain tentu pentingnya arti *patria* (tanah air) dan etos patriotisme, serta tingkat korupsi yang rendah. Ketiga hal itu tentu faktor yang sedang mengalami defisit besar dalam tata negara Indonesia. Itulah mengapa, kaum libertarian dan fundamentalis pasar mengkritik tajam bahwa regulasi sosial oleh negara adalah bentuk penentuan secara elitis yang hanya akan membawa Indonesia menuju kediktatoran dan korupsi lebih luas. Bagi Grossekkettler, kritik seperti itu salah bidik, sebab negara sosial dan regulasi sosial adalah bentuk komitmen politik demokrasi sosial, yang tentu tidak sesuai dengan pengandaian libertarian.¹⁶⁹ Dalam arti ini, hemat saya, soalnya bukan ’regulasi sosial’, melainkan terjadinya pemangsaan regulasi sosial oleh kekuatan-kekuatan yang punya sumberdaya finansial, atau yang sering disebut *state capture*.¹⁷⁰ Dan, ”*state capture* per definisi muncul dari konsentrasi kekuasaan ekonomi”.¹⁷¹

Kedua, ketertanaman dalam *community development* (pengembangan masyarakat). Pokok ini barangkali terdengar sederhana, tetapi pada hemat saya punya daya operatif yang paling kena dalam konteks Indonesia dewasa ini. Prospeknya dapat dilihat dari latar belakang masalah berikut ini. Sudah lama

'pembangunan' (*development*) di Indonesia berhenti. Banyak aktivitas yang dewasa ini disebut 'pembangunan' sesungguhnya berisi 'pemburuan rente' (*rent-seeking*).¹⁷² Dalam ungkapan populer pemburuan rente ini sering disebut dengan istilah peyoratif "proyek".

Dinamika kehidupan komunitas lokal secara intrinsik berisi denyut keterjalinan yang tercampur-baur antara berbagai arus tindakan yang oleh dunia akademik disebut bidang budaya, adat, ekonomi, agama, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Apa yang disebut ekonomi tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, dan pada gilirannya ekonomi serta lingkungan sulit dipisahkan dari hubungan antar umat beragama, kesehatan, hukum, politik, adat istiadat, dan seterusnya. Dalam bahasa yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi, dinamika konkret kehidupan komunitas lokal tidak pernah mengenal *ceteris paribus*.¹⁷³ Yang disebut *ceteris paribus* hanya ada di buku teks ilmu, entah itu ilmu ekonomi, geografi, politik, atau sejarah. Perbedaan bidang-bidang itu hanyalah ciptaan "momen analisis" – antropologi berfokus pada urusan nilai (*value*), ilmu politik suka berkonsentrasi pada dinamika kekuasaan (*power*), sebagaimana geografi berfokus pada urusan dinamika tata ruang (*space*).

Keterjalinan itu terjadi sebegitu rupa, sehingga potensi komunitas lokal dalam satu bidang (misalnya: ekonomi) secara faktual tertanam dalam potensi di bidang lingkungan, energi, budaya, politik, kesehatan, relasi antar agama, dan seterusnya. Bayangkan seorang melihat potensi tersembunyi dalam lingkup kehidupan komunitas lokal tersebut, misalnya tambang emas. Segera orang itu melakukan kolusi dengan aparat pemerintah setempat dan pusat, lalu pemerintah memberikan kontrak kepada orang tersebut. Staf dan buruhnya mulai pro-

ses menambang, dan sesekali warga setempat mendapat tetesan sampingan dari penambangan itu. Semua proses itu dilihat sebagai urusan 'ekonomi' dengan pendekatan ekonomi. Keterjalinannya dengan urusan hukum, budaya, hubungan antar umat agama, lingkungan, dan sebagainya samasekali tidak disentuh atau dianggap tidak relevan dari sudut pandang ekonomi. Kemudian melalui propaganda media dan *fiat* birokratik, proses ini disebut 'pembangunan' (*development*).

Tak ada yang lebih mengasingkan pembangunan daripada proses seperti itu. Karena ranah-ranah lain seperti budaya, hukum, lingkungan hidup, relasi antar agama, politik dan sebagainya tidak dilihat terjalin secara integral, semua ranah lain itu juga segera dianggap hanya instrumental terhadap pengejaran *surplus* dalam usaha penambangan. Biasanya yang lalu terjadi justru komodifikasi budaya, hukum, lingkungan, hubungan antar umat agama, dan politik komunitas lokal. Melalui proses itu, bukan hanya ekonomi dicerabut dari tata kelembagaan yang menyangga keseluruhan hidup komunitas lokal, tapi lalu tata institusi yang menyangga kelangsungan komunitas lokal juga mengalami komodifikasi secara mendalam. Pola yang sama bukan hanya terjadi dengan urusan pertambangan, tapi juga berlaku dalam urusan pertanian, peternakan, kerajinan, dan sebagainya.

Di situ juga jelas bahwa soalnya bukan terjadinya penambangan, perolehan laba, ataupun kinerja modal dari luar komunitas, melainkan tiadanya jaminan yang membuat proses penambangan, kinerja modal dan pengejaran laba secara integral tertanam dalam organisasi mata-pencaharian dan *survival* komunitas lokal. Ekonomi pasar tidak dengan sendirinya tercerabut, tetapi corak ekonomi pasar dalam contoh di atas jelas-jelas tidak tertanam dalam gugus kelembagaan

yang menyangga kelangsungan hidup komunitas. Tak ada dasar apa pun menyebut itu sebagai 'pembangunan'. Rupanya itulah mengapa model Ekonomi Pasar Sosial dalam contoh di atas secara sengaja menjamin kaitan itu dengan seperangkat regulasi sosial. Seperti ditulis Hart dan Hann, cukup pasti "Polanyi tidak pernah menolak manfaat besar 'pasar' untuk alokasi barang/jasa; apa yang ia kritik adalah pengangkatan 'pasar swatata' ke status penentu".¹⁷⁴ Dalam pengantar cetakan baru *GT* (2001), ekonom Stiglitz juga menulis: "Polanyi memandang pasar (*market*) sebagai bagian kehidupan ekonomi (*economy*) yang lebih besar, dan pada gilirannya ekonomi yang lebih besar itu merupakan bagian masyarakat (*society*) yang lebih besar lagi".¹⁷⁵ Apa yang menjadi masalah Polanyi bukanlah pasar, tetapi fundamentalisme pasar.¹⁷⁶

Apa hubungan soal ini dengan pengembangan komunitas (*community development*) sebagai modus ketertanaman ekonomi? Istilah 'pengembangan komunitas' menunjuk pada "gerakan yang dilakukan oleh dan/atau dengan keterlibatan aktif para warga suatu lokalitas, yang bertujuan memperbaiki kondisi komunitas itu secara kolektif; gerakan bisa berupa pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, infrastruktur seperti jalan, sumur, irigasi, pertanian, manufaktur ataupun perdagangan".¹⁷⁷ Tak ada yang baru dalam pokok ini, dan pengertian itu bisa dilacak bahkan ke zaman kolonial. Apa yang bisa dibuat baru adalah potensinya untuk menjadi *locus* ketertanaman ekonomi dalam tata kelembagaan hidup komunitas pada dataran paling konkret. Dalam proses dan dinamika konkret *community development*, tindakan di satu sektor (misalnya: ekonomi) tidak-bisa-tidak terkait langsung dengan urusan lingkungan, dialog antar umat beragama, hukum, adat-istiadat, tata kekuasaan, atau relasi sosial. Keuntungan (*gain*) pada satu sektor (misalnya: ekonomi) yang merusak ranah-

ranah lain dialami sebagai kerugian (*loss*) komunitas. Itu karena di dataran konkret, keuntungan atau kerugian tidak hanya dialami sebagai soal material (misalnya: gedung baru, *income* naik), tapi juga sebagai non-material (misalnya: udara segar, kerukunan hidup umat beragama). Dalam proses *community development*, ”perubahan di satu bidang dialami sebagai keuntungan atau kerugian bukan menurut tolok-ukur bidang itu sendiri, tetapi selalu dari kriteria seluruh gugus institusional yang menyangga kelangsungan hidup komunitas”.¹⁷⁸

Di situlah segera terlihat perbedaan yang menyolok antara pendekatan ”proyek” dan *community development*. ”Proyek” bukan hanya cenderung menjadi pengejaran rente, tetapi juga secara sempit membidik satu sektor tanpa memperhitungkan kaitannya dengan ranah-ranah lain yang secara keseluruhan menyangga kelangsungan hidup komunitas. Juga dengan kelemahannya, pengembangan komunitas punya kemungkinan lebih besar untuk membuat urusan peningkatan penghasilan bukan sebagai sektor yang terpisah dari ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, penciptaan lingkungan yang sehat, dialog antar umat beragama, perbaikan gizi, kesadaran politik, melek hukum, dan sebagainya. Lugasnya, *community development* adalah pembangunan ekonomi, hukum, politik, dialog umat beragama, budaya, kesehatan, lingkungan dan pendidikan suatu komunitas dalam satu tarikan nafas gerakan. Sekali lagi, dalam satu tarikan nafas gerakan! Hanya dalam *community development* dimungkinkan, misalnya, ”ekonomi yang ekologis” dan ”ekologi yang ekonomis”. Dalam pendekatan ”proyek”, apa yang ekonomis selalu dianggap tidak ekologis, dan apa yang ekologis dilihat tidak ekonomis. Imperatifnya lugas: kembalikan pendekatan pembangunan dari orientasi ”proyek” ke agenda *community development*!

Strategi menanam kembali ekonomi pasar melalui *community development* mungkin terdengar kolot. Tetapi ia punya satu kebajikan mendasar dibanding penjarahan rente atau laba oleh kelompok-kelompok yang gaya hidupnya justru berasal dari bisnis mencabut 'ekonomi' dari kehidupan banyak orang. Pendekatan *community development* secara serius menghormati kompleksitas dinamika tahap-tahap evolusi suatu masyarakat. Jika kemajuan pesat dalam aktivitas akumulasi laba tidak dengan sendirinya memajukan kehidupan kultural, lingkungan, kerukunan beragama, hukum, politik, kesehatan, dan sebagainya (seperti yang rupanya jelas-jelas terlihat di Indonesia), maka mungkin soalnya terletak dalam tiadanya keserentakan kemajuan. Dan itu mengisyaratkan bahwa berbagai sektor perlu ber-evolusi secara sejajar. Tetapi itu juga menuntut agar apa yang dianggap kemajuan di satu sektor (misal: sektor ekonomi) mesti disesuaikan secara paralel dengan sektor-sektor lain. Di situ-lah terletak keutamaan strategi *community development* untuk menanam kembali ekonom pasar, sebab persis dalam dinamika *community development* yang konkret tidak mungkin dilakukan langkah *ceteris paribus*.

Ketiga, ketertanaman epistemik ilmu ekonomi dalam semesta ilmu-ilmu sosial. Pokok terakhir tentang *ceteris paribus* di atas langsung membawa kita kembali pada apa yang telah berulang-kali disebut, yaitu ketercerabutan ilmu ekonomi dari ilmu-ilmu sosial lain. Sudah banyak ahli yang mengajukan imperatif agar ekonomi kembali mengkaitkan diri dengan ilmu-ilmu sosial lain.¹⁷⁹ Apa yang masih perlu disebut di sini hanya implikasi perspektif Polanyian. Apabila semua ekonomi selalu tertanam dalam gugus kelembagaan yang secara keseluruhan menyangga hidup masyarakat, maka kajian ilmu ekonomi juga tidak mungkin terkait dengan denyut masyarakat jika tidak terjadi saling-pem-

buah (*cross-fertilization*) antara kajian ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lain, seperti sejarah, antropologi, sosiologi, geografi sosial, ilmu politik.¹⁸⁰ Pada akhirnya satu bidang ilmu sosial hanyalah bentuk *ceteris paribus*; artinya, hanya satu kemungkinan meneropong realitas masyarakat dengan cara menanggulangi berbagai kemungkinan meneropong lain.

Tentu, tingkat spesialisasi yang menandai ilmu-ilmu sosial sudah berkembang begitu pesat sehingga agenda kaitan epistemik itu tidak mudah dilakukan lagi. Jika esoterisme spesialisasi itu terlalu sulit untuk diterobos, satu imperatif arah masih mungkin dilakukan: yaitu gerakan mencegah kebijakan publik (*public policy*) ditentukan hanya atas dasar kajian satu bidang ilmu. Sebab, seperti telah disebut, arus konkret gejala ataupun proses perubahan senantiasa merupakan ketercampurbauran "momen-momen" ekonomi, politik, hukum, budaya, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Sekali lagi, ciri konkret gejala tidak pernah ditandai *ceteris paribus*. Bahkan, kajian ilmu sesungguhnya juga tidak sanggup menetapkan kebijakan. Sudah lama Max Weber mengingatkan itu: "Menerapkan analisis ilmu pada kebijakan publik bukan tugas yang dapat dilakukan ilmu, sebab tugas itu hanya bisa dilakukan pribadi (pemimpin) yang berkehendak..., yang melibatkan pertimbangan nurani".¹⁸¹ Lugasnya, kajian ilmu dapat membantu pembuatan kebijakan publik, tetapi pada akhirnya kebijakan publik adalah keputusan politik, bukan penentuan ilmiah.

Pada titik ini, ada gunanya memungut kembali pertanyaan dasar di awal yang telah memandu tulisan ini: mengapa problematik ketertanaman dan ketercerabutan ekonomi merupakan persoalan penting? Terhadap pertanyaan itu, perkenankan saya mengajukan jawaban dalam tiga lapis argumen berikut ini:

- i. Ketertanaman dan ketercerabutan ekonomi menyangkut persoalan mendasar tentang corak kaitan antara kegiatan/pemikiran ekonomi dan organisasi pengadaan mata-pencapaian bagi kelangsungan hidup-bersama suatu masyarakat.
- ii. Bentuk ekonomi disebut tertanam apabila corak kegiatan/pemikiran ekonomi terkait erat dengan organisasi mata-pencapaian bagi kelangsungan hidup-bersama; gejala sebaliknya disebut tercerabut.
- iii. Agenda menanam kembali ekonomi pasar merupakan urgensi, mengingat kinerja ekonomi pasar ditandai oleh kecenderungan internal untuk tercerabut; pasar adalah perangkat yang punya manfaat besar bagi proses produksi dan alokasi, dan agenda menanam kembali ekonomi pasar berisi gerakan untuk menjamin kinerjanya terkait erat dengan organisasi mata-pencapaian bagi kelangsungan hidup-bersama.

Tiga lapis jawaban di atas juga menunjukkan bahwa problematik ketertanaman dan ketercerabutan ekonomi pada akhirnya menyangkut pokok lebih mendasar yang berupa ketertanaman lain. Itulah ketertanaman moral.

7. PENUTUP

Keempat, ketertanaman ekonomi dalam moralitas. Pokok ini terdengar kli-sé, tetapi apa yang saya maksud adalah perlunya menganggap serius pemikiran Polanyi tentang 'gerakan balik' (*double movement*). Jantung konsepsi 'gerakan balik' adalah keniscayaan munculnya langkah perlindungan-diri dari gejala perusakan yang dibawa-serta oleh derap transformasi, namun dampak perusakan

itu tidak dianggap penting sebelumnya. Berbeda dengan determinisme mekanis dalam Marxisme Ortodoks, gerakan perlindungan-diri ini muncul dari daya "masyarakat yang selalu dilengkapi dengan kapasitas untuk tindakan sadar dan terarah pada sesuatu, sedangkan alam tidak punya kapasitas itu".¹⁸²

Seperti ditulis panjang-lebar oleh Polanyi, perlindungan-diri itu tidak muncul dari kelompok-kelompok kiri, penganut ideologi kolektif, "pemimpin-pemimpin serikat buruh yang berpandangan sempit, para intelektual Marxist, pemilik pabrik yang rakus, dan para tuan tanah yang reaksioner".¹⁸³ Perlindungan-diri persis lahir dari dalam proyek pasar swatata itu sendiri.¹⁸⁴ Fakta bahwa gerakan-balik itu terjelma dalam gerakan kelompok-kelompok buruh, petani, atau juga kelompok-kelompok *civil society* lain adalah karena langkah perlindungan-diri tidak mungkin dilakukan oleh onggokan batu.¹⁸⁵ Barangkali arti mendasar ketertanaman moral itu dapat ditunjuk dengan rumusan demikian:

"Gravitasi bumi bukan masalah moral. Mengapa? Karena tidak ada apa pun yang dapat kita lakukan terhadap gravitasi itu. Pada zaman pra-modern, struktur pemerintahan dan ekonomi juga tidak nampak sebagai masalah moral. Tetapi segera sesudah manusia sadar akan kapasitasnya untuk membentuk dan menghancurkan tata struktur itu, urusan seperti pemerintahan dan ekonomi adalah perkara deliberalisi moral".¹⁸⁶

Rupanya juga makin menjadi jelas bahwa gerakan-balik merupakan cara bagaimana suatu masyarakat "menanam kembali" ekonomi pasar yang telah tercerabut. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa gerakan-balik dan perlindungan-diri akhirnya bukan pertama-tama perkara teknis ekonomi. Ia adalah persoalan moral.¹⁸⁷ Polanyi menulis: "Orang mudah sepakat bahwa hidup dalam kekosongan kultural samasekali bukanlah kehidupan, tetapi mereka juga ber-

harap bahwa terpenuhinya kebutuhan ekonomi dengan sendirinya akan mengisi kekosongan itu dan membuat hidup kelihatan lebih bertanggung di bawah kondisi seburuk apa pun”.¹⁸⁸ Namun, pada akhirnya:

”Kehancuran sosial pertama-tama adalah soal kultural, dan bukan persoalan ekonomi yang dapat diukur dengan angka-angka penghasilan atau statistik penduduk... Bukan penghisapan ekonomi, seperti yang sering diandaikan, tetapi kehancuran lingkungan kultural para korban adalah penyebab degradasi. Proses ekonomi bisa saja menyediakan sarana perusakan itu, dan memang hampir selalu terjadi bahwa inferioritas ekonomi membuat orang lemah mudah menyerah, tetapi penyebab langsung kejatuhannya bukan alasan ekonomi. Penyebab terletak dalam cedera mematikan yang meremuk lembaga-lembaga yang menjelmakan eksistensi sosialnya”.¹⁸⁹

Persis di situlah terletak kunci untuk memahami jantung pemikiran Karl Polanyi. Ia tidak mempercayakan perubahan kepada proses mekanis sejarah. Ia masuk jauh ke dalam logika ilmu ekonomi (termasuk masalah akuntansi)¹⁹⁰ dan sejarah ekonomi bukan untuk menawarkan kajian teknis ekonomi. Itu akan sangat membosankan untuk kecemerlangan daya intelektual seorang Karl Polanyi. Seandainya ekonomi pasar swatata bersifat alami, jerih-payah daya kreativitas intelektual tentu tidak berdaya bahkan untuk memperbaikinya. Polanyi masuk ke dalam logika internal ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi persis untuk menunjukkan tak ada yang alami dalam klaim tentang ciri swatata ekonomi pasar. Seperti telah ditulis pada tahun 1935, pemikiran Polanyi pada akhirnya digerakkan oleh kegelisahan moral: bagaimana agar ”realitas masyarakat menjadi relasi-relasi manusia”, dan bukan terutama ”transaksi-transaksi komoditas”.¹⁹¹

Di akhir bulan Maret 1944, ketika draft buku *GT* sudah di tangan penerbit, Michael Polanyi membaca draft yang dikirim kakaknya, Karl Polanyi. Kemudian pada 30 Maret 1944, Michael menulis surat kepada Karl tentang buku itu, tentang perbedaan mereka menyangkut beberapa argumen, dan tentang sentuhan pribadi ini:

”Jalan hidupmu nyaris terpenuhi dalam karya ini. Buku itu mengungkapkan pemikiran dan minat yang telah kau hayati sepanjang hidup.... Terutama, buku itu menyingkapkan kejernihan yang khas atas seluruh perjalanan hidupmu di masa lalu dan berkisah secara persis apa arti setiap detail dari jerih-payahmu yang beraneka-macam.”¹⁹²

Beberapa bulan kemudian (12 Juni 1944), Michael kembali menulis surat kepada Karl, antara lain: ”Banyak hal yang perlu dijernihkan di dunia ini, dan beberapa diserahkan kepada engkau dan aku dengan pengorbanan hilangnya ketenangan batin kita”¹⁹³

Menanam kembali ekonomi memang pertama-tama bukan suatu lapangan kerja. Ia adalah komitmen moral dan intelektual.

CATATAN AKHIR

¹ Roubini & Mihm, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, (New York: Penguin, 2010), hal. 59.

² Bairoch, *Economics and World History: Myths and Paradoxes* (Chicago: The University of Chicago Press, 1995).

³ Robinson, *Economic Philosophy* (Middlesex: Penguin, 1974), hal. 70.

⁴ 'Realitas masyarakat' (*the reality of society*) adalah istilah yang dipakai Polanyi untuk melukiskan ambivalensi kekuatan progresif dan konservatif dalam dinamika masyarakat (Polanyi, *The Great Transformation...*, [1944, 1957] 2001, hal. 267. Selanjutnya, rujukan ke buku ini disingkat dengan *GT*).

⁵ Vezér, 'The Polanyi Family' dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi* (Montréal: Black Rose Books, 1990), hal. 18.

⁶ *Ibid*, hal. 19.

⁷ Karl Polanyi (nama sebenarnya Károly Polanyi) adalah anak ketiga dari enam bersaudara, salah satunya meninggal ketika masih bayi. Adik kandung Karl adalah Michael (Mihály) Polanyi, seorang ahli kimia yang kemudian menekuni filsafat ilmu pengetahuan. Untuk silsilah keluarga Polanyi, lihat bagan "pohon keluarga besar" Pollacsek/Polanyi dalam Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of...*, 1990, hal. 264.

⁸ Múcsi, 'The Start of Karl Polanyi's Career' dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi* (Montréal: Black Rose Books, 1990), hal. 26.

⁹ Vezér, 1990, hal. 20.

¹⁰ Polanyi-Levitt & Mendell, 'Karl Polanyi: His Life and Times', *Studies in Political Economy*, (22, Spring 1987), hal. 18-19.

¹¹ *Ibid*, hal. 18.

¹² *Ibid*, hal. 18.

¹³ *Ibid*, hal. 18.

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

¹⁵ Lihat kumpulan tulisan khusus mengenai istri Polanyi, dalam McRobbie & Polanyi-Levitt, *Karl Polanyi in Vienna...*, 2006, hal. 255-293.

¹⁶ *Op.cit.*, hal. 22.

¹⁷ *Ibid*, hal. 23.

¹⁸ Refleksi Polanyi tentang arti dan penyebab Fascisme ini dapat dilihat dalam Polanyi, 'The Essence of...', 1935, hal. 359-394.

¹⁹ Seperti ditulis Polanyi: "Its main thesis was developed during the academic year 1939-40 in conjunction with his work in Tutorial Classes, organized by the Workers' Educational Association, at Morley College, London, at Canterbury, and at Bexhill" (Polanyi, 'Author's Acknowledgements', *GT*, hal. xl).

²⁰ Fleming, 'Three Years in Vermont...', 2001, hal. 28-29. Edisi Amerika Serikat (1944) diterbitkan oleh penerbit Farrar & Rinehart, sedangkan edisi Inggris (1945) diterbitkan oleh penerbit Victor Gollancz dengan judul *Origins of Our Time: The Great Transformation*. Tahun 1957, edisi sampul tipis (*paperback*) dicetak oleh Beacon Press,

kemudian tahun 2001 dicetak kembali dengan Kata Pengantar Joseph E. Stiglitz dan Pendahuluan Baru oleh Fred Block. Pada tahun 2000, buku itu sudah diterjemahkan sekurangnya ke dalam 9 bahasa lain. Penting juga untuk dicatat bahwa sebelum terbit tahun 1944, naskah buku ini dikenal dengan berbagai judul, seperti *The Liberal Utopia*, *The Great Transition*, dan *The Origins of the Cataclysm*. Variasi rancangan judul itu penting untuk memahami apa yang menurut Polanyi merupakan problematik pokok yang menjadi isi buku tersebut.

²¹ Karena pemerintah AS melarang istri Polanyi (Ilona) masuk AS, mulai tahun 1950 Polanyi hilir-mudik antara New York dan Pickering, Ontario, Kanada, di mana istrinya tinggal (Polanyi-Levitt & Mendell, 'Karl Polanyi: His Life...', 1987, hal. 14).

²² Lihat Polanyi, Arensberg & Pearson (eds), *Trade and Market in...*, 1957; Polanyi (with Rotstein & Bohannon), *Dahomey and the Slave...*, 1966; Dalton (ed), *Primitive, Archaic and Modern...*, 1968; Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977 (ed. Pearson).

²³ Riwayat hidup Karl Polanyi yang lebih lengkap, termasuk berbagai kisah dari para anggota keluarga, rekan-rekan dan kenalan, dapat ditemukan pada berbagai sumber, antara lain Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of...*, 1990; McRobbie & Polanyi-Levitt (eds), *Karl Polanyi in Vienna...*, 2006; Polanyi-Levitt & Mendell, 'Karl Polanyi: His Life...', 1987; Fleming, 'Three Years in Vermont...', 2001.

²⁴ Satu-satunya kesempatan Adam Smith memakai istilah itu adalah dalam konteks kalimat berikut: "As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an *invisible hand* to promote an end which was no part of it". Smith, *The Wealth of Nations* (ed. E. Cannan), (New York: Modern Library, [1776] 2000), pp. 484-485.

²⁵ Setelah saya menghitung dengan lebih cermat, jumlah lima kali ini juga merupakan koreksi terhadap klaim Bernard Barber bahwa Polanyi "memakai istilah itu hanya dua kali" dalam *The Great Transformation* (Barber, 'All Economies are Embedded: The

Career of a Concept and Beyond', *Social Research*, Vol. 62, Issue 2, Summer 1995, hal. 395).

²⁶ Polanyi, *GT*, hal. 60. Formulasi yang sama diulangi dalam Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 70. Kesempatan kedua adalah ketika Polanyi menjelaskan 'barter': "Acts of barter are here usually *embedded* in long-range relations implying trust and confidence, a situation which tends to obliterate the bilateral character of the transaction" (hal. 64). Kesempatan ketiga adalah ketika Polanyi menjelaskan 'tenaga kerja' yang kemudian berubah menjadi komoditas semu: "The same is true of the organization of labor. Under the guild system, as under every other economic system in previous history, the motives and circumstances of productive activities were *embedded* in the general organization of society" (hal. 73). Kali keempat: "But a principle quite unfavorable to individual and general happiness was wreaking havoc with his social environment, his neighborhood, his standing in the community, his craft; in a word, with those relationships to nature and man in which his economic existence was formerly *embedded*" (hal. 135). Kali kelima adalah pemakaian dalam 'Catatan tentang Sumber Kepustakaan', ketika tertulis judul "(f) *Economic systems, as a rule, are embedded in social relations; distribution of material goods is ensured by noneconomic motives*" (catatan rujukan untuk Bab 4, hal. 279).

²⁷ Mark Granovetter dalam Krippner *et al.*, 'Polanyi Symposium...', 2004, hal. 133.

²⁸ Telaah rinci mengenai gaya menulis dan pemakaian berbagai metafor serta gambaran figuratif dalam karya-karya Polanyi, lihat McRobbie, 'Vision and Expression: Literature and *The Great Transformation*' dalam K. McRobbie & K. Polanyi-Levitt (eds), *Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation*, (Montréal: Black Rose Books, 2006), hal. 85-106.

²⁹ Block, 'Introduction' to *The Great Transformation*, (Boston: Beacon Press, 2001), hal. xxiv (catatan kaki no. 10).

³⁰ Fleming, 'Three Years in Vermont: The Writing of Karl Polanyi's *The Great Transformation*', Paper presented at the Eight International Karl Polanyi Conference (Mexico City, 14 November 2001), hal. 17.

³¹ Polanyi, *GT*, hal. 3-4.

³² Polanyi, *GT*, Bab 1.

³³ Polanyi, *GT*, hal. 21.

³⁴ Polanyi, *GT*, terutama Bab 4.

³⁵ Dengan demikian perlu dipahami perbedaan antara 'pasar' (*market*) dan 'sistem pasar' (*market system*). Dalam gambaran yang lebih jelas, penjelasan Lindblom berikut mungkin berguna: *"We need first to draw a distinction between market system and market. Although not all societies embrace or contain a market system, all existing societies make use of markets. Walking down a street in either Maoist China or the USSR, a visitor would have seen markets for haircuts, bicycle repair, and consumer commodities..., raw materials and machines... Yet, despite the commonality of such interchanges in Maoist China and the Soviet Union, these societies were not called market systems... Just as a basket of parts does not make a computer until they are assembled or used in a particular way, so an assortment of markets does not make a market system until they are employed in a particular way – specially to organize or coordinate many of the activities of a society... This gives us a definition of the market system...: it is a system of societywide coordination of human activities not by central command but by mutual interactions in the form of [price] transactions"* (Lindblom, *The Market System...*, 2001, hal. 4; lihat juga hal. 23).

³⁶ Polanyi, *GT*, hal. 43-44.

³⁷ Pokok "tak ada tindakan yang semata ekonomi" dapat dipahami dengan contoh berikut. Andai Anda seorang dosen universitas. Anda berangkat ke kantor jam 05.00 pagi, bersama suami dan dua anak Anda yang akan masuk sekolah. Arus tindakan itu disebut apa? Di situ tercampur berbagai momen: tindakan fisik, tindakan geografis, tindakan afektif, kewajiban moral, dan bahkan ketika Anda mengajar tidak sepenuhnya disebut tindakan ekonomi, karena juga tindakan edukasi dan ekspresi komitmen atau minat akademik Anda. Dan semua momen itu terjalin satu sama lain sedemikian rupa sehingga tindakan satu mengandaikan tindakan lainnya. Dalam rumusan formal: *"It is quite possible that in a sequence of actions $a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3$, a_1 is part of doing b_1 , a_2 is part of doing both b_1 and b_2 , and a_3 is part of doing b_2 "* (Abell, *The Syntax of...*, 1987, hal. 84).

³⁸ Dalam bahasa Polanyi, 'komoditas' adalah *"objects produced for sale on the markets; markets, again, are empirically defined as actual contacts between buyers and sellers. Accordingly, every elements of industry is regarded as having been produced for sale, as then and then only will it be subject to the supply-and-demand mechanism interacting with price"* (Polanyi, *GT*, hal. 75).

³⁹ Polanyi, *GT*, hal. 75.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 75-76.

⁴¹ *Ibid*, hal. 76-77.

⁴² *Ibid*, hal. 79.

⁴³ Untuk pembuktian panjang-lebar mengenai pokok ini, lihat Polanyi, *GT*, Bab 12-16.

⁴⁴ *Op.cit.*, hal. 136.

⁴⁵ Bandingkan, misalnya, dengan Barber, 'All Economies are Embedded...,' 1995, hal. 401; Krippner, 'The Elusive Market...,' 2001, hal. 779; Gemici, 'Karl Polanyi and the Antinomies...,' 2008, hal. 10; Beckert, 'The Great Transformation of...,' 2009.

⁴⁶ *Op.cit.*, hal. 73.

⁴⁷ *Op.cit.*, hal. 135.

⁴⁸ *Op.cit.*, hal. 60.

⁴⁹ Hasil-hasil penelitian itu dapat dilihat dalam risalah-risalah antropologi ekonomi berikut ini: Polanyi, Arensberg & Pearson (eds), *Trade and Market in...*, 1957; Polanyi (with Rotstein & Bohannan), *Dahomey and the Slave...*, 1966; Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968; Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977.

⁵⁰ Polanyi, *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory* (New York: The Free Press, 1957), hal. 250.

⁵¹ Bandingkan, misalnya, dengan Gemici, 'Karl Polanyi and the Antinomies...,' 2008, hal. 16.

⁵² Misalnya, dalam Bab singkat (Bab 4, hanya 10 halaman) buku *The Livelihood of Man* (1977), Polanyi memakai *embedded* dan *embeddedness* sebanyak 6 kali (hlm. 48, 51, 53, dua kali pada halaman 55, 56).

⁵³ Polanyi, *Trade and Market in...*, 1957, hal. 68 (cetak miring ditambahkan).

⁵⁴ Barber, *op.cit.*, 1995, hal. 399.

⁵⁵ Bandingkan, misalnya, dengan Hall & Soskice (eds), *Varieties of Capitalism...*, 2001; Boyer, 'How and Why Capitalisms...,' 2005.

⁵⁶ Lihat, misalnya, Scott, *Corporate Business and...*, 1997.

⁵⁷ Lie, 'Embedding Polanyi's Market Society', *Sociological Perspectives*, (Vol. 34, No. 2, Summer 1991), hal. 229-230.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 219.

⁵⁹ Gemici, 'Karl Polanyi and the Antinomies of Embeddedness', *Socio-Economic Review* (Vol. 6, No. 1, January 2008), hal. 9.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 19-20.

⁶¹ *Ibid*, hal. 22.

⁶² Istilah *the livelihood of man* juga merupakan judul buku Polanyi yang diterbitkan setelah wafat, berisi posisi teoretik Polanyi yang dirumuskan dalam bahasa lebih formal (Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977).

⁶³ Block, 'Karl Polanyi and the Writing of *The Great Transformation*', *Theory and Society*, (Vol. 32, No. 3, June 2003), hal. 298.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 298.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 299.

⁶⁶ Granovetter, 'Economic Action and...', 1985; Pengaruh luas ini, misalnya, dapat dilihat dari statistik perbandingan pengutipan istilah *embedded* dan *embeddedness* sebelum dan sesudah artikel Granovetter itu (lihat Harvey, *et al.*, 'Working with and beyond Polanyian...', 2007, Tabel, hal. 5). Lihat juga Beckert, 'The Great Transformation of...', 2009, hal. 40.

⁶⁷ Lihat, misalnya, Evans, *Embedded Autonomy...*, 1995; Berger & Dore (eds), *National Diversity...*, 1996; Hollingsworth & Boyer (eds), *The Embeddedness of...*, 1997; Hall & Soskice (eds), *Varieties of...*, 2001.

⁶⁸ Bandingkan dengan Block, 'Karl Polanyi and the Writing of...', 2003, hal. 299.

⁶⁹ Polanyi, *The Livelihood of Man* (ed. H. W. Pearson), (New York: Academic Press, 1977), Bab 1.

⁷⁰ Polanyi, *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi* (ed. George Dalton), (New York: Anchor, 1968), hal. 66.

⁷¹ *Op.cit.*, hal. 6; cetak miring asli.

⁷² Polanyi, *Trade and Market in...*, 1957, hal. 243, 249, dan *passim*; Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 5, 19, 20, dan *passim*. Ungkapan "mata pencaharian manusia"

dipinjam dari baris sajak karya Hesiod – "Karena dewa-dewa telah menyembunyikan mata pencarian manusia" – dalam buku *Works and Days* yang dikutip di awal buku Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hlm. xxxvii.

⁷³ Polanyi, *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory* (New York: The Free Press, 1957), hal. 244.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 250.

⁷⁵ Bandingkan, misalnya, dengan Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 66.

⁷⁶ *Op.cit.*, hal. 250.

⁷⁷ Polanyi, *GT*, hal. 48.

⁷⁸ Polanyi, 1957, *op.cit.*, hal. 252.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 253.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 250.

⁸¹ Polanyi, *GT*, hal. 53.

⁸² *Op.cit.*, hal. 253.

⁸³ *Ibid*, hal. 265-266.

⁸⁴ Polanyi, *GT*, hal. 55.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 56-57; untuk sumber dari karya Aristoteles, lihat *Politics...*, Buku I, 3: 1- 5: 3.

⁸⁶ Polanyi, 1957, *op.cit.*, hal. 251.

⁸⁷ Bandingkan dengan Harvey, 'Instituting Economic...', 2007, hal. 165-166, 175.

⁸⁸ *Op.cit.*, hal. 242.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 250.

⁹⁰ Bandingkan, misalnya, dengan Hollis & Nell, *Rational Economic...*, 1975, hal. 62.

⁹¹ Biggart dalam Krippner, 'Polanyi Symposium...', 2004, hal. 131.

⁹² Polanyi, *GT*, Bab 7.

⁹³ Asal-usul undang-undang perlindungan kaum miskin ini adalah apa yang disebut oleh Polanyi sebagai *The Speenhamland Law*: "The justices of Beckshire, meeting at the Pelican Inn, in Speenhamland, near Newbury, on May 6, 1795, in a time of great distress,

decided that subsidies in aid of wages should be granted in accordance with a scale dependent upon the price of bread, so that a minimum income should be assured to the poor irrespective of their earnings” (Polanyi, GT, hal. 82).

⁹⁴ *Op.cit.*, hal. 86.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 103.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 107.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 75.

⁹⁸ Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 67.

⁹⁹ Polanyi, *GT*, hal. 107.

¹⁰⁰ Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 68.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 64.

¹⁰² Polanyi, *GT*, hal. 105.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 72.

¹⁰⁴ *Ibid*, *GT*, hal. 74.

¹⁰⁵ Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 68.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 69.

¹⁰⁷ Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 10-11.

¹⁰⁸ Bandingkan dengan Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 12.

¹⁰⁹ Polanyi, *GT*, Bab 9-10.

¹¹⁰ *Ibid*, *GT*, hal. 122.

¹¹¹ *Ibid*, *GT*, hal. 88.

¹¹² Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 71.

¹¹³ *Ibid*, hal. 71.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 69.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 68. Rumusan sama dapat juga dilihat dalam Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 11.

¹¹⁶ Zamagni, 'Economic Laws...', 1989, hal. 103. Lihat juga Arndt, *Economic Theory vs...*, 1984, hal.184-185.

¹¹⁷ Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 9-10. Bandingkan juga pokok ini dengan rumusan Karel Kosík (karena pentingnya pokok ini, saya terpaksa mengutip cukup panjang): "Economics is a system and a set of laws governing relations in which man is constantly being transformed into the 'economic man'. Entering the realm of economics, man is transformed. The moment he enters into economic relations, he is drawn, – irrespective of his will and consciousness – into situations and lawlike relations in which he functions as the homo oeconomicus, in which he exists and realizes himself only to the extent to which he fulfills the role of the economic man. Thus economics is a sphere of life that has the tendency to transform man into the economic man and that draws him into an objective mechanism which subjugates and adapts him. This reveals how nonsensical are such contemplations that would divorce the 'economic man' from capitalism as a system... Thus economics begins not with the 'economic man' but with the system, and for that purposes of this system it posits the 'economic man' as a well-defined element of its construction and functioning... A mere shift in perspective, intended to reveal certain aspects of reality, actually forms a reality that is altogether different, or, rather, substitutes one thing for another while being oblivious of this substitution. The substitution involves more than the methodological approach to reality: through the methodological approach, reality itself is changed. Methodology is ontologized" (Kosík, *The Dialectic of...*, 1976, hal. 52, 54).

¹¹⁸ Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 10.

¹¹⁹ Polanyi berkali-kali menunjuk pokok ini dengan berbagai ungkapan, seperti "This institutional arrangement is thus separate from the noneconomic institutions of society", atau "This is the case of separateness established in the nineteenth century" (Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 47, 48).

¹²⁰ Hollis & Nell, *Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), hal. 53.

¹²¹ Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 14-17.

¹²² Polanyi, *Trade and Market in...*, 1957, hal. 243; Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 19.

¹²³ Polanyi, *Trade and Market in...*, 1957, hal. 243; Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 19.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 243, 244.

- ¹²⁵ *Ibid*, hal. 244.
- ¹²⁶ Bandingkan dengan Polanyi, *Trade and Market in...*, 1957, hal. 247.
- ¹²⁷ Arrighi dalam Krippner *et al.*, 'Polanyi Symposium...,' 2004, hal. 125.
- ¹²⁸ Untuk kajian teoretik dan kebijakan tentang *structural adjustment*, lihat misalnya Brown *et al.*, *Structural Adjustment...*, 2000.
- ¹²⁹ *Op.cit*, hal. 246.
- ¹³⁰ *Ibid*, hal. 247.
- ¹³¹ Robbins, *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science* (London: Macmillan, 1935), hal. 16.
- ¹³² Polanyi, *The Livelihood of...*, 1977, hal. 21-22.
- ¹³³ *Ibid*, hal. 22.
- ¹³⁴ *Ibid*, hal. 23.
- ¹³⁵ *Ibid*, hal. 24.
- ¹³⁶ *Ibid*, hal. 26.
- ¹³⁷ *Ibid*, hal. 26; cetak miring asli.
- ¹³⁸ Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), hal. 14; cetak miring asli.
- ¹³⁹ Hirshleifer, 'The Expanding Domain...', 1985, hlm 53. Bandingkan juga dengan Fine, 'A Question of Economics...', 1999, hal. 415.
- ¹⁴⁰ Dalam proyek normatif, soalnya bukan apakah misalnya orang secara faktual bertindak memaksimalkan keuntungan, tetapi teori ekonomi hanya perlu memperlakukan manusia seolah-olah (*as if*) bertindak menurut prinsip maksimalisasi keuntungan: "The relevant question to ask about assumptions of a theory is not whether they are descriptively realistic, for they never are, but whether they are sufficiently good approximations for the purpose in hand... [whether] under a wide range of circumstances individual firms behave as if they were seeking rationally to maximize their expected returns" (Friedman, *Essays in Positive...*, 1953, hal. 15, 21).
- ¹⁴¹ Dalam ilmu politik, misalnya, agenda itu dapat dilihat pada Downs, *An Economic Theory of...*, 1957.

¹⁴² Stigler, Economics – The Imperial Science', *Scandinavian Journal of Economics*, (Vol. 86, No. 3, 1984) hal 307.

¹⁴³ Polanyi, *GT*, hal. 45-46.

¹⁴⁴ Lihat bahasa rinci mengenai pokok ini, misalnya, dalam Stiglitz, *The Roaring Nineties...*, 2003; Roubini & Mihm, *Crisis Economics...*, 2010.

¹⁴⁵ Duménil & Lévy, *Capital Resurgent...*, 2004, hal. 128-129. Apa yang dimaksud dengan istilah 'sektor finansial' (*finance*) adalah: "Note that by "finance" we do not simply mean the financial sector of the economy, but the complex of upper capitalist classes, whose property materializes in the holding of securities (stock shares, bonds, Treasury bills, etc), and financial institutions (central banks, banks, funds, etc)" (hal. 16).

¹⁴⁶ *The Economist*, 24 January 2009 – 'Greed and Fear: A Special Report on the Future of Finance', hal. 4.

¹⁴⁷ Polanyi, *Primitive, Archaic and...*, 1968, hal. 71.

¹⁴⁸ Harvey, 'Instituting Economic...', 2007, hal. 167.

¹⁴⁹ Krippner, The Elusive Market: Embeddedness and the Paradigm of Economic Sociology', *Theory and Society*, 30, 2001, hal. 798.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 802.

¹⁵¹ Krippner *et al.*, 'Polanyi Symposium...', 2004, hal. 111.

¹⁵² Harvey *et al.*, 'Working with and beyond Polanyian...', 2007, hal. 11; cetak miring asli.

¹⁵³ Untuk contoh perspektif yang berargumen tentang makin tidak relevannya tata negara, Ohmae, *The Borderless...*, 1992; Friedman, *The World is Flat...*, 2005. Untuk contoh perspektif yang berargumen tetap sentralnya tata negara, Strange, *States and...*, 1994; Evans, *Embedded Autonomy...*, 1995; Weiss, *The Myth of...*, 1998.

¹⁵⁴ Untuk penjelasan rinci mengenai pokok ini, lihat Roubini & Mihm, *Crisis Economics...*, 2010.

¹⁵⁵ Block dalam Krippner, 'Polanyi Symposium...', 2004, hal. 118.

¹⁵⁶ Polanyi, *GT*, hal. 201.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 205.

¹⁵⁸ *Ibid*, *GT*, hal. 207.

¹⁵⁹ Untuk kajian rinci mengenai pokok ini, lihat misalnya Koslowski (ed), *The Social Market Economy...*, 1998; Nicholls, *Freedom with Responsibility...*, 1994; Van Hook, *Rebuilding Germany...*, 2004.

¹⁶⁰ Lemke, 'The Birth of Bio-Politics', *Economy and Society*, 30/2, May, 2001, hal. 196.

¹⁶¹ Müller-Armack, 'The Principles of the Social Market Economy' dalam P. Koslowski (ed), *The Social Market Economy: Theory and Ethics of the Economic Order* (Berlin: Springer, [1965] 1998), hal. 273.

¹⁶² Adaman *et al.*, *Reinstituting the Economic Process: (Re)Embedding the Economy in Society and Nature* dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles, (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society* (Manchester: Manchester University Press, 2007), hal. 94.

¹⁶³ Harvey *et al.*, 'Working with and beyond Polanyian...,' 2007, hal. 11. Dalam kuliah umum yang disampaikan kepada Institute for Cultural Relations di Budapest, 9 Oktober 1963, Polanyi sendiri telah mengajukan siklus 'regulasi' dan 'deregulasi' ini: "Now, it would be capitalism seeing itself constrained to introduce elements of planning into its over-marketized realm. And now, again, socialism would be considering enhancing its achievements in economic planning by the introduction of certain market elements" (Karl Polanyi dalam Duczynska-Polanyi, 'Karl Polanyi...,' 1977, hlm. xix).

¹⁶⁴ Untuk kajian menarik tentang *embedded liberalism* pada masa ini, lihat misalnya Harvey, *A Brief History of...*, 2005, hal. 9-18.

¹⁶⁵ Untuk kajian rinci mengenai pokok ini, lihat misalnya Harvey, *A Brief History of...*, 2005. Dalam kaitannya dengan pemikiran Polanyi, lihat Hart & Hann, 'Introduction: Learning from...,' 2009, hal. 8.

¹⁶⁶ Stiglitz, *The Roaring Nineties: Why We're Paying the Price for the Greediest Decade in History*, (London: Penguin, 2003).

¹⁶⁷ Bienefeld, 'Suppressing the Double Movement to Secure the Dictatorship of Finance' dalam A. Buğra & K. Ağartan (eds), *Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project* (Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2007), hal. 20.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 20.

¹⁶⁹ Grossekkettler, 'On Designing an Institutional Infrastructure for Economies: The Freiburg Legacy after 50 Years', *Journal of Economic Studies*, 21/4, 1994, hal. 22.

¹⁷⁰ 'State capture' menunjuk pada "the efforts of firms to shape and influence the underlying rules of the game (i.e., legislations, laws, rules, decrees) through private payments to public officials" (Hellman et al., *Measuring Governance...*, 2000, hal. 4, 6; Hellman et al., *Seize the State...*, 2000).

¹⁷¹ World Bank, *Anticorruption in...*, 2000, hlm. xx.

¹⁷² Istilah 'pemburuan rente' (*rent-seeking*) mulai dikenal sejak dasawarsa 1970-an. Arti istilah itu dapat dijelaskan dengan contoh ini: "Suppose that a courtier persuades the queen to grant him a royal monopoly to sell playing cards throughout the kingdom. The courtier so favored will capture sizable monopoly profits or economic rents, and this will be observed by other persons who might like to enter the industry. But their entry is effectively prevented by enforcement of the royal monopoly privilege. [T]he potential entrants are not likely to sit quietly by and allow the favored one among their number to enjoy his differentially advantageous position. Instead of passive observation, potential entrants will engage in "rent seeking." They will invest effort, time, and other productive resources in varying attempts to shift the queen's favor toward their own cause. Promotion, advertising, flattery, persuasion, cajolery - these and other attributes will characterize rent-seeking behavior" (Buchanan, 'Rent-Seeking and...', 1980, hal. 7-8). Pemburuan rente selalu melibatkan "bribery, hiring relatives of officials or employing the officials themselves..." (Krueger, 'The Political Economy of...', 1974, hal. 292).

¹⁷³ *Ceteris paribus* adalah istilah bahasa Latin, berarti "dengan mengandaikan hal/faktor lain sama/konstan". Ia bukan istilah ekonomi. Ilmu ekonomi hanya meminjamnya dari ungkapan yang sering dipakai dalam retorika klasik. Saya bahkan menemukan ungkapan *ceteris paribus* dalam dokumen perkumpulan religius Serikat Jesus (SJ) yang ditulis sekitar tahun 1540, jadi 350 tahun sebelum istilah itu digunakan ekonom Alfred Marshall tahun 1890. Andaikan Anda mau menjelaskan gejala Y, dalam suatu analisis dan karena keterbatasan, Anda hanya menggunakan faktor penjelas X dan Z, tetapi tentu X serta Z itu bukanlah seluruh faktor yang menjelaskan terjadinya Y. Maka Anda bilang/menulis: "X dan Z adalah faktor-faktor yang menyebabkan Y, *ceteris paribus*". Rumusan resmi arti *ceteris paribus* dalam analisis ekonomi adalah sebagai berikut: "The element of time is a chief cause of those difficulties in economic investigations which make it necessary for

*man with his limited powers to go step by step; breaking up a complex question, studying one bit at a time, and at last combining his partial solutions into a more or less complete solution of the whole riddle. In breaking it up, he segregates those disturbing causes, whose wanderings happen to be inconvenient, for the time in a pound called Ceteris Paribus. The study of some group of tendencies is isolated by the assumption "other things being equal": the existence of other tendencies is not denied, but their disturbing effect is neglected for a time. The more the issue is thus narrowed, the more exactly can it be handled, but also the less closely does it correspond to real life" (Marshall, *Principles of...*, [1890, 1920] 1972, hal. 304).*

¹⁷⁴ Hart & Hann, *Market and Society: The Great Transformation Today*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 9.

¹⁷⁵ Stiglitz, 'Foreword to *GT...*', 2001, hal. xv.

¹⁷⁶ Bandingkan juga dengan Servet, 'Toward an Alternative...', 2009.

¹⁷⁷ Marris, 'Community Development' dalam A. Kuper & J. Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, (London: Routledge, 1996), Second Edition, hal. 115-116.

¹⁷⁸ Batten, *Communities and Development* (Oxford: Oxford University Press, 1971), hal. 6.

¹⁷⁹ Beberapa contoh bisa disebut: Hollis & Nell, *Rational Economic...*, 1975; Arndt, *Economic Theory vs...*, 1984; Ormerod, *The Death of...*, 1994. Heilbroner & Milberg, *The Crisis of Vision in...*, 1995; Lawson, *Economics and...*, 1997; Hodgson, *How Economics Forgot...*, 2001; Fine & Milonakis, *From Economics Imperialism...*, 2009; Akerlof & Shiller, *Animal Spirits...*, 2009.

¹⁸⁰ Bandingkan juga imperatif epistemologi Polanyian bagi studi ekonomi ini dengan Stanfield, *The Economic Thought of...*, 1986, hal. 26.

¹⁸¹ Weber, *The Methodology of the Social Sciences* (trans. & ed. E. Shils), (New York: The Free Press, 1977), hal. 52.

¹⁸² Adaman *et al.*, 'Reinstituting the Economic Process...', 2007, hal. 94.

¹⁸³ Polanyi, *GT*, hal. 157.

¹⁸⁴ Polanyi, *GT*, Bab 12-16. Setelah menunjukkan berbagai data historis, Polanyi menyimpulkan misalnya: *"The countermove against economic liberalism and laissez-faire possessed all the unmistakable characteristics of a spontaneous reaction. At innumerable disconnected points it set in without any traceable links between the interests directly affected*

*or any ideological conformity between them. Even in the settlement of one of the same problem as in the case of workmen's compensation, solutions switched over from individualistic to collectivistic, from liberal to anti-liberal, from laissez-faire to interventionist forms, without any change in the economic interest, the ideological influences or political forces in play, merely as a result of the increasing realization of the nature of the problem in question... Even free trade and competition required intervention to be workable... For, if market economy was a threat to the human and natural components of the social fabric..., what else would one expect than an urge on the part of a great variety of people to press for some sort of protection?... The behavior of liberals themselves proved that the maintenance of freedom of trade – in our terms, of a self-regulating market – far from excluding intervention, in effect, demanded such action, and that liberals themselves regularly called for compulsory action on the part of the State as in the case of trade union law and anti-trust laws” (Polanyi, *GT*, hal. 156-157).*

¹⁸⁵ Pentingnya gerakan *civil society* dalam perspektif Polanyian, lihat Mendell, 'Karl Polanyi and...', 2007; Adaman *et al.*, 'Reinstituting the Economic Process: (Re) Embedding the Economy in Society and Nature' dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles, (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society* (Manchester: Manchester University Press, 2007).

¹⁸⁶ Finn, *The Moral Ecology of Markets: Assessing Claims about Markets and Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 39.

¹⁸⁷ Bandingkan dengan Rotstein, 'The Reality of Society...', 1990.

¹⁸⁸ Polanyi, *GT*, hal. 165.

¹⁸⁹ *Ibid*, hal. 164.

¹⁹⁰ Sejak pindah ke Vienna (1919), Polanyi juga terlibat dalam pemikiran teknis tentang akuntansi, terutama dalam perdebatan dengan para ekonom Lingkaran Vienna (Rosner, 'Karl Polanyi on...', 1990).

¹⁹¹ Istilah *the reality of society* dan *relationship of persons* sudah sering dipakai dalam tulisannya di tahun 1935, lihat Polanyi, 'The Essence of...', 1935, hal. 371, 375, 382.

¹⁹² Surat Michel Polanyi kepada Karl Polanyi (30 Maret 1944) dalam Fleming, 'Three Years in Vermont...', 2001, hal. 23.

¹⁹³ Surat Michel Polanyi kepada Karl Polanyi (12 Juni 1944) dalam Fleming, 'Three Years in Vermont...', 2001, hal. 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Abell, Peter. (1987). *The Syntax of Social Life: The Theory and Method of Comparative Narratives*, Oxford: Clarendon Press, 1987.
- Adaman, Fikret *et al.*, (200). 'Reinstituting the Economic Process: (Re)Embedding the Economy in Society and Nature' dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles, (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society*, Manchester: Manchester University Press.
- Akerlof, George A. & Shiller, Robert J., (2009). *Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism*, New Jersey: Princeton University Press.
- Aristotle, (1967). *Politics* (trans. H. Rackham). Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Arndt, Helmut. (1984). *Economic Theory vs Economic Reality*. Michigan: Michigan State University Press.
- Bairoch, Paul. (1995). *Economics and World History: Myths and Paradoxes*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Barber, Bernard. (Summer 1995): 'All Economies are Embedded: The Career of a Concept and Beyond', *Social Research*, Vol. 62, Issue 2.
- Batten, T. R., (1971). *Communities and Development*, Oxford: Oxford University Press.
- Becker, Gary S., (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Beckert, Jens, (2009). 'The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the New Economic Sociology' dalam C. Hann & K. Hart (eds), *Market and Society: The Great Transformation Today*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Berger, Suzanne & Dore, Ronald (eds). (1996). *National Diversity and Global Capitalism*, Ithaca: Cornell University Press.
- Bienefeld, Manfred. (2007). 'Suppressing the Double Movement to Secure the Dictatorship of Finance' dalam A. Buğra & K. Ağartan (eds), *Reading*

- Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project*, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
- Block, Fred. (2001). 'Introduction' to *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press.
- Block, Fred. (June 2003). 'Karl Polanyi and the Writing of *The Great Transformation*,' *Theory and Society*, Vol. 32, No. 3.
- Boyer, Robert, (November, 2005). 'How and Why Capitalisms Differ,' *Economy and Society*, Vol. 34, No. 4.
- Brown, Ed *et al.*, (2000). *Structural Adjustment: Theory, Practice, Impacts*, London: Routledge.
- Buchanan, James M., (1980). 'Rent-Seeking and Profit-Seeking' in J. M. Buchanan *et al.* (eds.), *Towards a Theory of the Rent-Seeking Society*, Texas: Texas A & M University Press.
- Buğra, Ayşe & Ağartan, Kaan (eds). (2007). *Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project*, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
- Cook, Scott, (April, 1966). 'The Obsolete Anti-Market Mentality: A Critique of the Substantive Approach to Economic Anthropology,' *American Anthropologist*, Vol. 68, No. 2, Part 1.
- Downs, Anthony, (1957). *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper & Row.
- Duczynska-Polanyi, Ilona. (197). 'Karl Polanyi: Notes on His Life' dalam K. Polanyi, *The Livelihood of Man* (ed. Harry W. Pearson), New York: Academic Press.
- Duménil, Gérard & Lévy, Dominique, (2004). *Capital Resurgent: Roots of the Neo-liberal Revolution*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [*The*] *Economist*, 'Greed – and Fear: A Special Report on the Future of Finance', 24 January 2009.
- Evans, Peter B. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, New Jersey: Princeton University Press.

- Fine, Ben & Milonakis, Dimitris. (2009). *From Economics Imperialism to Freakonomics: The Shifting Boundaries between Economics and Other Social Sciences*, London: Routledge.
- Fine, Ben. (August, 2009). 'A Question of Economics: Is It Colonizing the Social Sciences?', *Economy and Society*, Vol. 28, No. 3.
- Finn, Daniel K. (2006). *The Moral Ecology of Markets: Assessing Claims about Markets and Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Fleming, Berkeley, (2001). 'Three Years in Vermont: The Writing of Karl Polanyi's *The Great Transformation*', Paper presented at the Eight International Karl Polanyi Conference, Mexico City, 14 November 2001.
- Friedman, Milton. (1953). *Essays in Positive Economics*, Chicago: The University of Chicago Press, 1953.
- Friedman, Thomas L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*, New York: Farrar-Strauss-Giroux.
- Gemici, Kurtuluş. (January, 2008). 'Karl Polanyi and the Antinomies of Embeddedness', *Socio-Economic Review*, Vol. 6, No. 1.
- Granovetter, Mark. (1985). 'Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness', *American Journal of Sociology*, 91.
- Grossekettler, Heinz G. (1994). 'On Designing an Institutional Infrastructure for Economies: The Freiburg Legacy after 50 Years', *Journal of Economic Studies*, 21/4.
- Hall, Peter & Soskice, David (eds), (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, Oxford: Oxford University Press.
- Hann, Chris & Hart, Keith (eds). (2009). *Market and Society: The Great Transformation Today*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hart, Keith & Hann, Chris. (2009). 'Introduction: Learning from Polanyi I' dalam C. Hann & K. Hart (eds), *Market and Society: The Great Transformation Today*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey, David. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press.

- Harvey, Mark; Ramlogan, Ronnie; Randles, Sally (eds), (2007). *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society*, Manchester: Manchester University Press.
- Harvey, Mark. (2007). 'Instituting Economic Processes in Society' dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society*, Manchester: Manchester University Press.
- Harvey, Mark *et al.*, (2007). 'Working with and beyond Polanyian Perspectives', dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society*, Manchester: Manchester University Press.
- Hausman, Daniel M & McPherson, Michael S., (1998). *Economic Analysis and Moral Philosophy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hechter, Michael. (1981). 'Karl Polanyi's Social Theory: A Critique', *Politics and Society*, Vol. 10, No. 4.
- Heilbroner, Robert & Milberg, William. (1995). *The Crisis of Vision in Modern Economic Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hellman, Joel *et al.*, (April, 2000). *Measuring Governance Corruption and State Capture*, World Bank Working Paper, No. 1312.
- Hellman, Joel *et al.*, (September, 2000). *Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition*, World Bank Working Paper, No. 2444.
- Hirshleifer, Jack., (December 1985). 'The Expanding Domain of Economics', *American Economic Review*, Vol. 75, No. 6.
- Hodgson, Geoffrey M., (2001). *How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science*, London: Routledge.
- Hollingsworth, J. R. & Boyer, Robert (eds). (1997). *Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollis, Martin & Nell, Edward J., (1975). *Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Kosík, Karel. (1976). *The Dialectics of the Concrete: A Study on Problems of Man and World*, Volume LII, Dordrecht: D. Reidel.
- Kosłowski, Peter (ed). (1998). *The Social Market Economy: Theory and Ethics of the Economic Order*, Berlin: Springer.
- Krippner, Greta. (2001). 'The Elusive Market: Embeddedness and the Paradigm of Economic Sociology', *Theory and Society*, 30.
- Krippner, Greta *et al.*, (2004). 'Polanyi Symposium: A Conversation on Embeddedness', *Socio-Economic Review*, 2.
- Krueger, Anne O. (1974). 'The Political Economy of the Rent-Seeking Society', *The American Economic Review*, Vol. 64, No. 3.
- Lawson, Tony. (1997). *Economics and Reality*, London: Routledge.
- Lemke, Thomas. (May 2001). 'The Birth of Bio-Politics', *Economy and Society*, 30/2.
- Lie, John. (1991). 'Embedding Polanyi's Market Society', *Sociological Perspectives*, Vol. 34, No. 2, Summer.
- Lindblom, Charles E., (2001). *The Market System: What It Is, How It Works, and What to Make of It*, New Haven: Yale University Press.
- Marris, Peter. (1996). 'Community Development' dalam A. Kuper & J. Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, London: Routledge, Second Edition.
- Marshall, Alfred. (1972). *Principles of Economics*, London: Macmillan, [1890, 1920], Eighth Edition.
- McRobbie, Kenneth. (2006). 'Vision and Expression: Literature and *The Great Transformation*' dalam K. McRobbie & K. Polanyi-Levitt (eds), *Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation*, Montréal: Black Rose Books.
- McRobbie, Kenneth & Polanyi-Levitt, Kari (eds). (2006). *Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation*, Montréal: Black Rose Books.
- Mendel, Marguerite. (2007). 'Karl Polanyi and the Instituted Process of Economic Democratisation' dalam dalam M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles

- (eds), *Karl Polanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society*, Manchester: Manchester University Press.
- Múcsi, Ferenc. (1990). 'The Start of Karl Polanyi's Career' dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi*, Montréal: Black Rose Books.
- Müller-Armack, Alfred, 'The Principles of the Social Market Economy' dalam P. Koslowski (ed), ([1965] 1998). *The Social Market Economy: Theory and Ethics of the Economic Order*, Berlin: Springer.
- Nicholls, A. J., (1994). *Freedom with Responsibility: The Social Market Economy in Germany, 1918-1963*, Oxford: Clarendon Press.
- Ohmae, Kenichi. (1992). *The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace*, London: HarperCollins.
- Ormerod, Paul. (1994). *The Death of Economics*, London: Faber & Faber.
- Polanyi, Karl. ([1944] 2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston: Beacon Press.
- Polanyi, Karl. (1968). *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi* (ed. George Dalton), New York: Anchor.
- Polanyi, Karl. (1977). *The Livelihood of Man* (ed. H. W. Pearson), New York: Academic Press.
- Polanyi, Karl (in collaboration with A. Rotstein). (1966). *Dahomey and the Slave Trade: An Analysis of an Archaic Economy*, Seattle: University of Washington Press.
- Polanyi, Karl; Lewis, John; Kitchin, Donald K. (eds). (1935). *Christianity and Social Revolution*, London: Victor Gollancz.
- Polanyi, Karl; Arensberg, C.; Pearson, H. (eds). (1957). *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*, New York: The Free Press.
- Polanyi-Levitt, Kari & Mendell, Marguerite. (1987). 'Karl Polanyi: His Life and Times', *Studies in Political Economy*, 22, Spring.
- Polanyi-Levitt, Kari (ed). (1990). *The Life and Work of Karl Polanyi*, Montréal: Black Rose Books.

- Robbins, Lionel C., (1935). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, London: Macmillan, Second Edition.
- Robinson, Joan. (1974). *Economic Philosophy*, Middlesex: Penguin.
- Rosner, Peter. (1990). 'Karl Polanyi on Socialist Accounting' dalam dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi*, Montréal: Black Rose Books.
- Rotstein, Abraham. (1990). 'The Reality of Society: Karl Polanyi's Philosophical Perspective' dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi*, Montréal: Black Rose Books.
- Roubini, Nouriel & Mihm. (2010). Stephen, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, New York: Penguin.
- Scott, John. (1997). *Corporate Business and Capitalist Classes*, Oxford: Oxford University Press.
- Servet, Jean-Michel. (2009). 'Toward an Alternative Economy: Reconsidering the Market, Money, and Value' dalam C. Hann & K. Hart (eds), *Market and Society: The Great Transformation Today*, Cambridge: Cambridge University Press,
- Slater, Don & Tonkiss, Fran. (2001). *Market Society: Markets and Modern Social Theory*, Cambridge: Polity.
- Smith, Adam. ([1776] 2000). *The Wealth of Nations* (ed. E. Cannan), New York: Modern Library.
- Stanfield, J. R., (1986). *The Economic Thought of Karl Polanyi*, London: Macmillan.
- Stigler, George. (1984). 'Economics – The Imperial Science', *Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 86, No. 3.
- Stiglitz, Joseph E., (2001). 'Foreword' dalam K. Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston: Beacon Press, [1944, 1957].
- Stiglitz, Joseph E., (2003). *The Roaring Nineties: Why We're Paying the Price for the Greediest Decade in History*, London: Penguin.

- Strange, Susan. (1994). *States and Markets*, London: Pinter, Second Edition.
- Van Hook, James C., (2004). *Rebuilding Germany: The Creation of the Social Market Economy 1945-1957*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Vezér, Erzsébet. (1990). 'The Polanyi Family' dalam K. Polanyi-Levitt (ed), *The Life and Work of Karl Polanyi*, Montréal: Black Rose Books.
- Weber, Max (1977). *The Methodology of the Social Sciences* (trans. & ed. E. Shils), New York: The Free Press.
- Weiss, Linda. (1998). *The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era*, Cambridge: Polity.
- World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*, Washington D. C.
- Zamagni, Stefano. (1989). 'Economic Laws' dalam J. Eatwell *et al.* (ed), *The Invisible Hand*, New York: W. W. Norton.